

# Sintesis Hasil Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Enam Kabupaten Mitra INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Hastuti

Nina Toyamah

Syaikhu Usman

**LAPORAN PENELITIAN SMERU**

**Sintesis Hasil Studi Diagnostik Pembelajaran  
Pendidikan Dasar di Enam Kabupaten Mitra INOVASI  
di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Hastuti

Nina Toyamah

Syaikhu Usman

**Editor**

Budhi Adrianto

Wiwin Purbaningrum

**The SMERU Research Institute**

**Desember 2018**

# TIM PENELITIAN

## **Peneliti SMERU**

Akhmadi

Asep Kurniawan

Hastuti

Rachma Indah Nurbani

Ruhmaniyati

Syaikhu Usman

Valentina Utari

## **Peneliti Tamu**

Kartawi

Lina Rozana

Pitriati Solihah

Steve Christiantara

## **Peneliti Lokal**

Dedy Hermansyah

Fathul Rakhman

Rahmayati

Saprudin

## **Penasihat**

Widjajanti Isdijoso

Data Katalog-dalam-Terbitan The SMERU Research Institute

Hastuti, Nina Toyamah, dan Syaikhu Usman

Laporan penelitian SMERU: Sintesis Hasil Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Enam Kabupaten Mitra INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat. / Ditulis oleh Hastuti, Nina Toyamah, dan Syaikhu Usman.

x, 33 hal ; 30 cm.

ISBN 978-602-7901-47-6

1. Pembelajaran Pendidikan Dasar. I. Judul

370.7 –ddc23



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); atau kunjungi situs web [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

Foto Sampul: Dok. SMERU

# UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan sintesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Daniel Suryadarma, Megha Kapoor, Dita Nugroho, Basilius Bengoteku, dan staf lainnya dari tim Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (The Innovation for Indonesia's School Children, INOVASI), yang telah memfasilitasi dan memberi arahan teknis selama pelaksanaan penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di Badan Penelitian dan Pengembangan, atas masukan berharga yang telah diberikan terkait penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada pemerintah daerah wilayah penelitian, terutama para bupati, sekretaris daerah, kepala badan/dinas di bidang pendidikan beserta stafnya yang telah memperlancar dan memberikan informasi berharga sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para informan kunci di bidang pendidikan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa atas informasinya yang berharga. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid yang telah bersedia diwawancarai dan meluangkan waktu mereka. Terakhir, kami berterima kasih kepada para peneliti di wilayah penelitian dan peneliti tamu yang telah membantu tim peneliti SMERU dalam melakukan wawancara dan diskusi kelompok terfokus untuk mengumpulkan informasi di lapangan.

## Sintesis Hasil Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Enam Kabupaten Mitra INOVASI di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hastuti, Nina Toyamah, dan Syaikhu Usman

Partisipasi pendidikan dasar di Indonesia hampir universal, tetapi masih terdapat masalah pembelajaran, khususnya lemahnya kemampuan literasi dan numerasi murid. Oleh karena itu, pada 2016 Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia menggagas Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (The Innovation for Indonesia's School Children, INOVASI) di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) selama empat tahun guna mendukung kebijakan pendidikan yang lebih baik. Pada awal pelaksanaan program, SMERU melaksanakan penelitian untuk mendiagnostik sistem pembelajaran pendidikan dasar. Penelitian dilaksanakan pada 2016 di enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten hingga sekolah, diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*, FGD), dan studi dokumen terkait pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua kabupaten memiliki banyak kesamaan permasalahan, yaitu (i) kualitas guru rendah, (ii) jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) kurang dengan distribusi yang tidak merata, (iii) pelatihan guru kurang, (iv) komitmen guru rendah, (v) anggaran dan infrastruktur pendidikan kurang, (vi) perhatian dan dukungan orang tua rendah, (vii) minat belajar anak rendah, (viii) pengaruh kepentingan politik kuat, (ix) pembelajaran murid tidak tuntas, dan (x) pengawasan terhadap sekolah lemah. Solusinya dapat dilakukan melalui (i) penyelesaian persoalan terkait tata kelola dan kualitas guru untuk menghasilkan guru berkualitas dan profesional dalam jumlah cukup dan (ii) perbaikan sistem belajar mengajar yang mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi semua kelompok murid. Selain itu, perlu dilakukan studi kuantitatif untuk menyediakan informasi yang terukur tentang masalah pembelajaran, analisis inovasi, dan hubungan antarpemangku kepentingan di tingkat pendidikan dasar.

Kata kunci: inovasi, pembelajaran, guru, murid, literasi, numerasi

# DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	v
RANGKUMAN EKSEKUTIF	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Tujuan Penelitian	1
1.2 Metode Penelitian	1
1.3 Gambaran Umum Kondisi Pembelajaran di Provinsi NTB	2
1.4 Tentang Laporan	3
II. ANALISIS EKONOMI POLITIK TENTANG PERMASALAHAN PEMBELAJARAN DI DAERAH	4
2.1 Pengantar	4
2.2 Permasalahan Pembelajaran	4
2.3 Komunikasi di antara dan antarpemangku Kepentingan	10
III. ANALISIS INOVASI PEMBELAJARAN DI DAERAH	11
3.1 Inisiatif Daerah	11
3.2 Sasaran dan Dampak INOVASI	13
IV. PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBELAJARAN: KETERTARIKAN DAN PENGARUH	15
4.1 Pengantar	15
4.2 Ketertarikan dan Pengaruh	15
4.3 Pelibatan Aktor dan Koordinasi	17
V. PENUTUP	18
DAFTAR ACUAN	19
LAMPIRAN	21

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Potret Pendidikan di Enam Kabupaten Sampel di Provinsi NTB, 2015/2016	3
Tabel 2. Perbandingan Guru PNS dan GTT SD/MI di Tingkat Kabupaten	5

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rangkuman Permasalahan Pembelajaran di Enam Kabupaten Sampel di Provinsi NTB dan Penilaian Tingkat Keyakinannya	22
Lampiran 2 Bentuk Kebijakan/Inovasi/Program Pembelajaran Pendidikan Dasar di Daerah Berdasarkan Pemrakarsa	29

# DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

ABK	anak berkebutuhan khusus
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ACDP	Analytical and Capacity Development Partnership
APM	angka partisipasi murni
Bappeda	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
BERMUTU	Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BOSDA	Bantuan Operasional Sekolah Daerah
calistung	membaca, menulis, dan berhitung
DFAT	Australian Department of Foreign Affairs and Trade
dikpora	pendidikan, pemuda, dan olahraga
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ELPSA	<i>experience, language, pictorial, symbolic, dan application</i>
FGD	<i>focus group discussion</i> (kelompok diskusi terfokus)
GTT	guru tidak tetap
IKIP	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
INOVASI	The Innovation for Indonesia's School Children (Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia)
KBM	kegiatan belajar mengajar
KBP	Klub Baca Perempuan
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KKG	Kelompok Kerja Guru
KKM	kriteria ketuntasan minimal
LCD	<i>liquid crystal display</i>
LP3ES	Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial
LPPH	Lembaga Psikologi Pelangi Harapan
LPTK	Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
MGMP	Musyawarah Guru Mata Pelajaran
MI	madrasah ibtidaiyah
MKKS	Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
NTB	Nusa Tenggara Barat
NTT	Nusa Tenggara Timur

OECD	Organization for Economic Cooperation and Development (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan)
OMS	organisasi masyarakat sipil
ornop	organisasi nonpemerintah
PAI	Pendidikan Agama Islam
pemda	pemerintah daerah
perbup	peraturan bupati
permendikbud	peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
PISA	Programme for International Student Assessment
PNS	pegawai negeri sipil
ProDEP	Professional Development for Education Personnel (Program Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan)
PT	perguruan tinggi
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
S-1	sarjana strata satu
SD	sekolah dasar
setda	sekretaris daerah
SMP	sekolah menengah pertama
SMS	<i>short message service</i> (layanan pesan singkat)
SKPD	satuan kerja perangkat daerah
SPM	standar pelayanan minimal
UPTD	unit pelaksana teknis dinas
USAID	The United States Agency for International Development

# RANGKUMAN EKSEKUTIF

Pada 2014 partisipasi pendidikan dasar di Indonesia hampir universal dengan angka partisipasi murni (APM) hampir 100% untuk sekolah dasar (SD) dan 80% untuk sekolah menengah pertama (SMP). Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih mengalami krisis pembelajaran, khususnya terkait kemampuan literasi dan numerasi murid. Berdasarkan peringkat Programme for International Student Assessment (PISA), misalnya, Indonesia berada pada peringkat bawah di antara negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) maupun non-OECD. Selain itu, 75% murid-murid di Indonesia gagal mencapai kemampuan dasar matematika. Berangkat dari permasalahan tersebut, pada 2016 Pemerintah Indonesia yang diwakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Pemerintah Australia yang diwakili Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) menggagas Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (The Innovation for Indonesia's School Children, INOVASI). Program yang menasar jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) ini akan dilaksanakan selama empat tahun untuk mengumpulkan bukti keberhasilan proses belajar dan memfasilitasi pemanfaatan bukti tersebut untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pemantauan, evaluasi, penelitian, dan pembelajaran dengan fokus pada aspek kualitas pengajaran di kelas, dukungan pengajaran berkualitas, dan kepastian bahwa semua murid belajar. Kemendikbud dan DFAT memilih enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima, sebagai mitra pertama program.

Pada tahap awal program, INOVASI dibantu The SMERU Research Institute melakukan studi diagnostik terhadap sistem pendidikan dasar di kabupaten mitra untuk memahami (i) konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam ekosistem pendidikan; (ii) pemangku kepentingan yang relevan, serta kedudukan dan pengaruhnya dalam ekosistem pendidikan; dan (iii) perkembangan kebijakan dan inovasi dengan fokus pada masalah pembelajaran murid, khususnya terkait dengan kemampuan literasi dan numerasi di tingkat pendidikan dasar.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan informasi dilakukan pada Juli dan Agustus 2016. Di setiap kabupaten, informasi dikumpulkan melalui 24–30 wawancara pemangku kepentingan tingkat kabupaten hingga sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), 16 wawancara kelompok (guru, murid, dan orang tua murid), dan satu diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*, FGD) tingkat kabupaten. Selain itu, dikumpulkan pula berbagai dokumen yang meliputi data profil pendidikan serta dokumen kebijakan tingkat kabupaten yang relevan dengan pendidikan dasar.

## Gambaran Umum Kondisi Pembelajaran di Provinsi NTB

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi yang menghadapi permasalahan rendahnya hasil pembelajaran murid, khususnya di tingkat pendidikan dasar. USAID<sup>i</sup> (dalam INOVASI, 2016a) melaporkan bahwa lebih dari 20% murid kelas 2 di NTB mengalami kesulitan dalam membaca. Mereka bahkan tidak dapat memahami kata sederhana dalam bacaan. Menurut ACDP<sup>ii</sup> (dalam INOVASI, 2016a), hanya satu dari tiga murid kelas 8 di NTB dapat menjawab pertanyaan tentang isi sebuah cerita pendek.

<sup>i</sup>The United States Agency for International Development.

<sup>ii</sup>Analytical and Capacity Development Partnership.

Kemampuan murid pendidikan dasar di provinsi ini dalam hal numerasi pun tergolong rendah. ACDP (dalam INOVASI, 2016a) menemukan bahwa hanya satu dari empat murid kelas 4 dapat menjawab soal matematika berbentuk pengurangan  $238-129 = (?)$  dan hanya satu dari sepuluh murid kelas 4 dapat menjawab soal matematika berbentuk pembagian  $655 : 5 = (?)$ . Di tingkat SMP, hasil studi ACDP (INOVASI, 2016a) menunjukkan bahwa hanya satu dari empat murid kelas 8 dapat menjawab soal cerita matematika tentang rasio. Studi tersebut menyimpulkan bahwa permasalahan pembelajaran di Provinsi NTB bukan hanya dalam kemampuan literasi dan numerasi dasar. Murid di kelas lebih tinggi juga masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan. Toyamah *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa hanya sekitar 42% murid di SD sampel di Lombok Tengah mampu menjawab lebih dari 50% soal matematika dan hasil tersebut terendah dibandingkan dengan hasil dari kabupaten studi di provinsi lain.

Secara umum, profil pendidikan pada 2015/2016 di enam kabupaten studi ini hampir sama. Perbedaan capaian indikator antarkabupaten tidak signifikan dan cenderung tidak konsisten. Misalnya, angka putus sekolah tingkat SD dan nilai rata-rata kompetensi guru relatif lebih baik berturut-turut di Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Sumbawa. Sementara itu, APM tingkat SD tertinggi dan rasio guru dan murid terendah dicapai oleh Bima dan Dompu. Dari enam indikator pendidikan yang ada, empat indikator dicapai dengan lebih baik oleh Sumbawa Barat.

## Permasalahan Pembelajaran

Hasil studi ini menunjukkan bahwa sepuluh permasalahan utama pembelajaran yang disampaikan informan di semua kabupaten memiliki banyak persamaan, yaitu (i) kualitas guru rendah, (ii) jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) kurang dan distribusinya tidak merata, (iii) pelatihan bagi guru kurang, (iv) komitmen guru rendah, (v) anggaran dan infrastruktur pendidikan kurang, (vi) perhatian dan dukungan orang tua rendah, (vii) minat belajar murid rendah, (viii) pengaruh kepentingan politik kuat, (ix) pembelajaran murid tidak tuntas, dan (x) pengawasan terhadap sekolah lemah. Permasalahan tersebut saling terkait; permasalahan yang satu bisa menjadi penyebab munculnya permasalahan lainnya.

Empat dari sepuluh permasalahan utama tersebut berkaitan dengan guru. Kurangnya jumlah dan tidak meratanya penempatan guru PNS disebabkan terbatasnya rekrutmen dan adanya campur tangan politik. Kualitas guru rendah karena, antara lain, rendahnya kualitas lembaga pendidikan dan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan bidang ajar.

Kekurangan guru PNS tersebut mendorong sekolah dan pemerintah daerah (pemda) untuk mengangkat guru tidak tetap (GTT). Namun, hal tersebut dilakukan tanpa mengikuti standar yang jelas dan jumlah GTT cenderung berlebihan khususnya karena ada “titipan” pejabat. Sebagai dampaknya, 43%–64% guru di kabupaten studi berstatus GTT. Secara umum, rata-rata rasio murid dan guru PNS di tingkat kabupaten studi masih memadai, tetapi karena masalah sebaran, rasio murid dan guru antarsekolah sangat beragam. Sebuah SMP di Bima, misalnya, hanya mempunyai dua guru PNS dan salah satunya adalah kepala sekolah.

Idealnya, masalah di setiap sekolah bisa diatasi dengan menindaklanjuti laporan hasil pengawasan pengawas sekolah yang telah diverifikasi oleh kepala unit pelaksana teknis dinas (UPTD) dan/atau kepala Dinas Pendidikan. Namun, terlepas dari rendahnya kapasitas pengawas sekolah, terdapat kecenderungan bahwa laporan pengawas sekolah di semua kabupaten studi tidak mendapat perhatian dari lembaga terkait.

Untuk berbagai kepentingan, dalam lingkup pendidikan dasar di semua kabupaten studi, terdapat jaringan komunikasi antarlembaga, tetapi nyaris tidak ditemukan penggunaan teknologi komunikasi yang intensif, berpola, dan berkelanjutan. Komunikasi mereka lebih banyak mengandalkan tatap muka, seperti rapat atau kunjungan langsung, dan surat resmi. Media komunikasi berupa telepon dan telepon genggam cenderung hanya digunakan untuk mengundang peserta pertemuan. Selain itu, penggunaan aplikasi media sosial sebagai alat komunikasi di antara dan antarpemangku kepentingan masih dipandang “tidak pantas”. Jika pun ada yang menggunakan media sosial, jumlahnya masih terbatas. Komunikasi orang tua dengan guru atau pihak sekolah cenderung jarang dilakukan dan itu pun biasanya berlangsung melalui tatap muka. Komunikasi guru dengan murid di luar jam sekolah juga umumnya dilakukan melalui tatap muka; hanya di beberapa sekolah komunikasi dilakukan dengan telepon genggam.

## Kebijakan/Program/Inovasi

Di semua kabupaten studi ditemukan kebijakan/program/inovasi terkait pendidikan, khususnya pembelajaran, yang merupakan inisiatif daerah. Berbagai inovasi tersebut bervariasi antarkabupaten dalam hal jumlah, bentuk, penggagas, dan beberapa aspek lainnya. Kabupaten dengan jumlah inovasi inisiatif daerah paling banyak berturut-turut adalah Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Utara, Bima, Dompu, dan Lombok Tengah. Penggagas inovasi daerah dapat dibedakan menjadi pemda (bupati/Dinas Pendidikan), organisasi nonpemerintah (ornop), perusahaan, dan sekolah (kepala sekolah/guru). Di semua kabupaten studi terdapat inovasi inisiatif pemda, baik berupa replikasi program pusat/provinsi/lembaga lain maupun murni gagasan daerah. Bentuknya adalah, antara lain, (i) Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang merupakan replikasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pusat; (ii) insentif untuk guru di daerah terpencil dan madrasah; (iii) peningkatan kapasitas guru; (iv) penambahan tenaga guru; (v) pengembangan perpustakaan; (vi) pengembangan jurnal ilmiah; dan (vii) penuntasan pembelajaran murid melalui pendampingan bagi murid yang masih lemah dalam membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Inovasi-inovasi tersebut didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan, khususnya di empat kabupaten studi, bantuan dana dari luar negeri.

Inovasi yang digagas ornop ditemukan di hampir semua kabupaten, tetapi paling banyak di Sumbawa Barat dan Lombok Utara karena ada dukungan pendanaan dari perusahaan yang beroperasi di kedua kabupaten tersebut. Bentuk inovasi ornop, antara lain, berupa pendirian rumah/taman baca, pendampingan perpustakaan dan majalah dinding sekolah, pelatihan peningkatan mutu dan pendampingan bagi guru, bantuan fasilitas sekolah inklusif, dan pendirian sekolah komunitas. Inovasi perusahaan ditemukan di Sumbawa Barat dan Lombok Utara. Beberapa perusahaan memberikan bantuan langsung kepada sasaran dalam bentuk beasiswa bagi murid, pembebasan lahan, pembangunan sekolah, dan dukungan kegiatan kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Inovasi sekolah ditemukan di semua kabupaten studi, kecuali di Lombok Utara. Inovasi tersebut berupa pendampingan guru kepada murid, pelatihan pidato/ceramah, prakarsa membaca buku sebelum kelas dimulai, diskusi guru, pembentukan komite sekolah per dusun, dan penggunaan teknologi proyektor, telepon genggam, dan internet dalam kegiatan belajar mengajar.

Semua inovasi dengan sasaran murid, guru, dan manajemen sekolah tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi murid, mendorong minat belajar murid, meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, dan mendorong peran aktif masyarakat/orang tua. Dengan kata lain, semua itu pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Namun, karena dananya terbatas, sarannya tidak luas, dan penerapannya belum lama atau tidak konsisten, dampak berbagai inovasi tersebut belum dapat diidentifikasi.

Meskipun terdapat fakta bahwa kabupaten studi dengan jumlah inovasi terbanyak memiliki beberapa indikator pendidikan yang lebih baik, adanya hubungan antara jumlah inovasi dan kondisi pendidikan di tingkat kabupaten harus didukung banyak bukti lain yang diperoleh melalui metodologi yang tepat.

## Pemangku Kepentingan

Bidang pendidikan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berdasarkan tugas dan fungsinya dapat dikelompokkan ke dalam pembuat, pelaksana, dan pendukung kebijakan. Berdasarkan analisis kuadran, ketertarikan dan pengaruh pemangku kepentingan terhadap pembelajaran murid bervariasi antarlembaga dan antarkabupaten. Secara umum, sekolah dan Dinas Pendidikan dianggap memiliki tingkat ketertarikan dan pengaruh yang paling tinggi karena memiliki peran dan tanggung jawab yang berkaitan langsung dengan pembelajaran. Di sebagian besar kabupaten studi, pemangku kepentingan pembuat kebijakan tingkat kabupaten, yakni bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga dianggap memiliki tingkat ketertarikan dan pengaruh yang tinggi karena sangat menentukan besarnya dukungan anggaran dan beragamnya inovasi pendidikan. Di sebagian kabupaten studi, pengawas sekolah dinilai mempunyai tingkat ketertarikan dan pengaruh tinggi, meski dengan catatan perlu adanya peningkatan kualitas pengawasan, pelaporan, dan pemanfaatan hasil pengawasan. Tingginya tingkat ketertarikan dan pengaruh tersebut merupakan indikasi perlunya untuk melibatkan lembaga tersebut dalam program pengembangan pembelajaran di kabupaten studi. Lembaga lain seperti Dewan Pendidikan dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) juga dapat berperan dalam memperkaya fasilitasi pembelajaran, khususnya dalam meningkatkan kapasitas guru.

## Penutup

Masalah ketidaktuntasan belajar murid merupakan persoalan serius dalam sistem pembelajaran di Indonesia yang menyebabkan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi murid. Persoalan ini perlu dicarikan jalan keluarnya, antara lain, melalui (i) penyelesaian persoalan terkait kualitas dan manajemen guru untuk menghasilkan guru berkualitas dan profesional dalam jumlah cukup dan (ii) perbaikan sistem belajar mengajar yang dapat mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi semua kelompok murid. Terlepas dari pelaksanaannya yang masih tertatih-tatih, program sekolah inklusi di Provinsi NTB perlu terus dikembangkan untuk menjamin akses pendidikan bagi semua penduduk usia sekolah. Selain itu, studi diagnostik yang menggunakan pendekatan kualitatif ini membutuhkan dukungan studi kuantitatif agar dapat menyediakan informasi yang terukur tentang masalah pembelajaran, analisis inovasi, dan keterkaitan antarpemangku kepentingan tingkat pendidikan dasar di daerah.

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Partisipasi pendidikan dasar di Indonesia telah mencapai keseimbangan gender dan mendekati universal. Pada 2014, angka partisipasi murni (APM) hampir 100% untuk sekolah dasar dan 80% untuk sekolah menengah pertama. Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih mengalami krisis pembelajaran yang menurut Anies Baswedan saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Oktober 2014–Juli 2016) berada dalam ‘keadaan darurat’. Negara telah berinvestasi besar di bidang pendidikan, tetapi skor Programme for International Student Assessment (PISA), misalnya, berada di peringkat bawah di antara negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) maupun non-OECD; dan bahkan 75% murid Indonesia gagal mencapai kemampuan dasar matematika (Kemendikbud<sup>1</sup>, 2014; Kompas, 2014).

Berangkat dari masalah tersebut, Pemerintah Indonesia yang diwakili Kemendikbud dan Pemerintah Australia yang diwakili Australian Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) bersepakat untuk menggagas Program Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (The Innovation for Indonesia’s School Children, INOVASI). Program ini bertujuan (i) mengumpulkan bukti tentang apa yang berhasil dan dalam situasi bagaimana hasil belajar murid pendidikan dasar dapat meningkat dan (ii) memfasilitasi pemanfaatan bukti tersebut untuk memperbaiki kebijakan pendidikan dan praktik pembelajaran. Pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan program tersebut terdiri atas empat komponen, yaitu pemantauan, evaluasi, penelitian, dan pembelajaran. Sementara itu, aspek yang menjadi fokus program ada tiga, yakni (i) kualitas pengajaran di kelas, (ii) dukungan pengajaran berkualitas, dan (iii) kepastian bahwa semua murid belajar. Program ini akan dilaksanakan selama empat tahun di daerah mitra. Kemendikbud dan DFAT memilih enam kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yaitu Lombok Tengah, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, dan Bima, sebagai mitra pertama program.

Pada tahap awal program, INOVASI dibantu The SMERU Research Institute melaksanakan studi diagnostik terhadap sistem pendidikan di daerah mitra untuk (i) memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam ekosistem pendidikan; (ii) mengetahui pemangku kepentingan yang relevan, serta kedudukan dan pengaruhnya dalam ekosistem pendidikan; dan (iii) mengetahui sejarah atau perkembangan kebijakan dan inovasi pendidikan di tingkat kabupaten yang berfokus pada masalah pembelajaran murid, khususnya terkait masalah literasi dan numerasi di tingkat pendidikan dasar.

## 1.2 Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Di setiap kabupaten, informasi dikumpulkan melalui wawancara individual dengan sekitar 24–30 pemangku kepentingan tingkat kabupaten hingga tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP); wawancara kelompok dengan empat kelompok guru, empat kelompok orang tua murid, empat kelompok murid perempuan, dan empat kelompok murid laki-laki; dan satu diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*, FGD) dengan perwakilan berbagai pemangku kepentingan tingkat kabupaten. Pengumpulan data

---

<sup>1</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

menggunakan pedoman wawancara, pedoman diskusi kelompok, dan panduan FGD.<sup>2</sup> Selain itu, dikumpulkan pula berbagai dokumen yang meliputi data profil pendidikan serta dokumen kebijakan tingkat kabupaten yang relevan.<sup>3</sup>

Pengumpulan data di setiap kabupaten dilakukan oleh tiga peneliti SMERU dan seorang peneliti daerah. Kunjungan pertama untuk pengumpulan data di tiga kabupaten (Lombok Tengah, Sumbawa, dan Bima) dilakukan pada 18–30 Juli 2016 dan kunjungan kedua ke tiga kabupaten lainnya (Lombok Utara, Sumbawa Barat, dan Dompu) dilakukan pada 8–20 Agustus 2016.

### 1.3 Gambaran Umum Kondisi Pembelajaran di Provinsi NTB

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi permasalahan rendahnya mutu pembelajaran murid, khususnya di tingkat pendidikan dasar. USAID<sup>4</sup> (dalam INOVASI, 2016a) melaporkan bahwa di Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT), NTB, dan Papua lebih dari 20% (satu dari lima) murid kelas 2 adalah ‘bukan pembaca’. Mereka bahkan tidak dapat memahami kata sederhana dalam bacaan. Hasil studi ACDP<sup>5</sup> (dalam INOVASI, 2016a) juga memperlihatkan bahwa hanya satu dari tiga murid kelas 8 di NTB dapat menjawab pertanyaan tentang isi sebuah cerita pendek.

Kemampuan numerasi murid tingkat pendidikan dasar di provinsi ini juga masih tergolong rendah juga. Studi ACDP (dalam INOVASI, 2016a) menunjukkan bahwa hanya satu dari empat murid kelas 4 dapat menjawab soal matematika berbentuk pengurangan  $238-129 = (?)$  dan hanya satu dari sepuluh murid kelas 4 yang dapat menjawab soal matematika berbentuk pembagian  $655:5 = (?)$ . Di tingkat SMP, hasil studi ACDP (dalam INOVASI, 2016a) menunjukkan bahwa hanya satu dari empat murid kelas 8 dapat menjawab soal cerita matematika tentang rasio. Studi tersebut menyimpulkan bahwa permasalahan pembelajaran di Provinsi NTB bukan hanya sekadar kemampuan literasi dan numerasi dasar. Murid di kelas lebih tinggi pun masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan pengetahuan. Hal ini sesuai dengan kesimpulan Suydam (dalam Karnasih, 2012) bahwa salah satu faktor yang berpengaruh secara konsisten terhadap kemampuan pemecahan masalah soal cerita adalah keterampilan memahami bacaan.

Toyamah *et al.* (2009) juga mengungkapkan bahwa hanya sekitar 42% murid di sekolah sampel di Lombok Tengah mampu menjawab lebih dari 50% soal matematika dan hasil tersebut terendah dibandingkan dengan hasil dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Nunukan. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa secara nasional terdapat penurunan hasil tes matematika murid kelas 4 pada 2008 dibandingkan hasil pada 2003. Hasil studi juga memperlihatkan hubungan yang signifikan antara prestasi murid kelas 4 dan salah satu indikator yang berhubungan dengan karakteristik guru, yaitu bahwa tingkat absensi guru berkorelasi negatif dengan hasil tes matematika. Selain itu, faktor keterpencilan daerah atau kemajuan sosial-ekonomi masyarakat di suatu daerah memiliki hubungan erat dengan baik-buruknya kondisi pendidikan, khususnya pembelajaran.

---

<sup>2</sup>Penyempurnaan panduan dan instrumen penelitian dilakukan melalui uji coba survei di Kabupaten Purwakarta pada 13–17 Juni 2016. Pada acara yang sama juga dilakukan penyamaan persepsi semua peneliti yang terlibat.

<sup>3</sup>Nama dokumen atau data sekunder yang dapat dikumpulkan dapat dilihat dalam lampiran pada laporan survei diagnostik pembelajaran pendidikan dasar setiap kabupaten mengenai daftar perolehan data sekunder (tersedia di situs web The SMERU Research Institute).

<sup>4</sup>The United States Agency for International Development.

<sup>5</sup>Analytical and Capacity Development Partnership.

Secara umum, profil pendidikan enam kabupaten sampel pada 2015/2016 hampir sama (lihat Tabel 1). Perbedaan capaian indikator antarkabupaten sangat tipis/tidak signifikan dan cenderung tidak konsisten. Misalnya, angka putus sekolah tingkat SD dan nilai rata-rata kompetensi guru relatif lebih baik berturut-turut di Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Sumbawa. Sementara itu, nilai rata-rata ujian nasional tingkat SD/MI (madrasah ibtidaiah) yang relatif tinggi dicapai berturut-turut oleh Sumbawa Barat, Bima, Sumbawa, dan Dompu. Untuk indeks pembangunan manusia, angka tertinggi dicapai oleh Sumbawa Barat, disusul Dompu, Sumbawa, dan Bima. Sementara itu, angka partisipasi murni tingkat SD tertinggi dan rasio guru dan murid terendah dicapai oleh Bima dan Dompu. Secara umum, dari indikator pendidikan yang ada, empat di antaranya dicapai dengan lebih baik oleh Sumbawa Barat daripada kabupaten sampel lainnya.

**Tabel 1. Potret Pendidikan di Enam Kabupaten Sampel di Provinsi NTB, 2015/2016**

Indikator	Kabupaten					
	Bima	Dompu	Lombok Tengah	Lombok Utara	Sumbawa	Sumbawa Barat
Angka putus sekolah tingkat SD (%)	0,32	0,22	0,14	0,06	0,07	0,04
Nilai rata-rata kompetensi guru SD	45	46	51	53	52	56
Nilai rata-rata ujian nasional SD/MI	56	55	53	52	55	58
Angka partisipasi murni tingkat SD (%)	96	96	92	82	80	84
Rasio guru-siswa SD	9	9	14	15	11	12
Indeks pembangunan manusia–2014	63	64	62	60	63	67

Sumber: INOVASI, 2016b.

## 1.4 Tentang Laporan

Laporan ini merupakan sintesis dari enam laporan studi diagnostik pembelajaran pendidikan dasar di Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat. Laporan sintesis ini menyajikan analisis kecenderungan umum, baik berupa persamaan maupun perbedaan antarkabupaten, yang meliputi tiga aspek bahasan sesuai dengan alur laporan setiap kabupaten, yaitu analisis ekonomi politik tentang permasalahan pembelajaran di daerah, analisis inovasi pembelajaran di daerah, dan tingkat ketertarikan dan pengaruh setiap pemangku kepentingan dalam pembelajaran di tingkat pendidikan dasar.

## II. ANALISIS EKONOMI POLITIK TENTANG PERMASALAHAN PEMBELAJARAN DI DAERAH

### 2.1 Pengantar

Pada bagian ini dipaparkan permasalahan utama pembelajaran yang disampaikan oleh para informan atau pemangku kepentingan bidang pendidikan di semua kabupaten sampel. Selain itu, akan diulas pula hubungan dan komunikasi di antara dan antarpemangku kepentingan bidang pendidikan di daerah mitra.

Permasalahan yang disampaikan oleh setiap kelompok informan di semua kabupaten memiliki banyak persamaan. Dari sepuluh permasalahan utama terkait pembelajaran, delapan di antaranya terjadi di semua kabupaten.<sup>6</sup> Kesepuluh permasalahan tersebut adalah (i) jumlah guru pegawai negeri sipil (PNS) kurang dan distribusinya tidak merata; (ii) kualitas guru rendah; (iii) pelatihan guru kurang; (iv) komitmen guru rendah; (v) anggaran dan infrastruktur pendidikan kurang; (vi) perhatian dan dukungan orang tua rendah; (vii) minat belajar murid rendah; (viii) pengaruh kepentingan politik kuat; (ix) pembelajaran murid tidak tuntas, terutama di Lombok Tengah dan Dompu; dan (x) pengawasan terhadap sekolah lemah, khususnya di Lombok Tengah dan Lombok Utara. Permasalahan tersebut saling berkaitan; permasalahan yang satu bisa menjadi penyebab munculnya permasalahan lainnya.

Tingkat keyakinan setiap permasalahan dapat diperkirakan dengan melihat jumlah pemangku kepentingan dan kelompok informan yang menyampaikannya, dan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan, yakni tinggi, sedang, dan rendah. Permasalahan pembelajaran yang memiliki tingkat keyakinan tinggi adalah permasalahan (i), (ii), (iii), (v), dan (vi); permasalahan dengan tingkat keyakinan sedang adalah permasalahan (iv) dan (vii); dan permasalahan dengan tingkat keyakinan rendah adalah permasalahan (viii), (ix), dan (x). Tingkat keyakinan setiap permasalahan pembelajaran di masing-masing kabupaten dapat dilihat secara detail pada Lampiran 1.

### 2.2 Permasalahan Pembelajaran

#### 2.2.1 Jumlah Guru PNS yang Kurang dan Distribusinya yang Tidak Merata

Upaya perbaikan penghasilan guru, antara lain, melalui program sertifikasi guru telah meningkatkan kesejahteraan guru. Kini profesi guru banyak diminati. Akan tetapi, rekrutmen guru PNS terbatas sehingga hampir semua sekolah mengaku mengalami kekurangan guru yang disediakan pemerintah. Informan juga mengatakan bahwa banyak sekolah masih kekurangan guru bidang studi. Selain itu, sebaran guru PNS dinilai tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Bahkan, di sebuah SMP negeri di Bima, hanya kepala sekolah dan seorang guru berstatus PNS. Penyebabnya adalah, antara lain, pengaruh kepentingan politik dalam proses penempatan guru PNS.

---

<sup>6</sup>Rincian lengkap sepuluh permasalahan pembelajaran teratas di setiap kabupaten tersedia pada laporan survei diagnostik pembelajaran masing-masing kabupaten (Hastuti, 2016; Utari, Kurniawan, dan Hermansyah, 2016; Kurniawan *et al.*, 2016; Nurbani, 2016; Akhmadi *et al.*, 2016; dan Ruhmaniyati *et al.*, 2016).

Untuk mengatasi masalah kurangnya guru PNS akibat distribusi yang tidak merata tersebut, sekolah dan daerah menggunakan jalan pintas dengan mengangkat guru tidak tetap (GTT). Di semua kabupaten sampel, pengangkatan GTT tidak mengikuti standar yang jelas dan jumlahnya cenderung berlebihan. Pengangkatan GTT dalam jumlah berlebihan ini didorong, antara lain, oleh adanya ‘titipan’ dari pejabat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Dikpora) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan; pengawas sekolah; anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); dan bupati terpilih yang memberikan janji politik untuk membuka lapangan kerja saat kampanye. Sebagai dampaknya, hampir separuh guru di beberapa daerah dan bahkan lebih dari separuh guru di beberapa daerah lainnya berstatus GTT (lihat Tabel 2).

Di beberapa SD sampel, seorang guru PNS mengampu satu kelas dengan bantuan satu hingga empat GTT. Jumlah GTT yang berlebihan itu cenderung membuat guru PNS absen mengajar. Bahkan, ada cerita tentang guru PNS yang membayar GTT untuk menggantikannya mengajar.

**Tabel 2. Perbandingan Guru PNS dan GTT SD/MI di Tingkat Kabupaten**

Kabupaten	Persentase		Sumber
	PNS	GTT	
Bima	37	63	Dinas Dikpora Kabupaten Bima, 2014
Dompu	36	64	Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, 2010
Sumbawa	51	49	Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa
Sumbawa Barat	57	43	Dinas Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat, 2012 (tidak termasuk MI)
Lombok Tengah	55	45	Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Tengah, 2016
Lombok Utara	48	52	Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Utara, 2015 dan Dinas Dikpora Provinsi NTB, 2015

Para GTT tersebut umumnya hanya diberi honor yang rendah atau bahkan tidak dibayar karena dianggap bekerja secara sukarela. Mereka bersedia menjadi GTT sebagai upaya peningkatan status dan karena terbatasnya kesempatan kerja. Saat ini mereka menuntut peningkatan kesejahteraan dan berjuang untuk menjadi PNS, antara lain, melalui asosiasi guru seperti PGRI, PGTTI, dan FGII.<sup>7</sup>

Kini rata-rata rasio murid dan guru (PNS dan GTT) tingkat SD adalah kurang dari 12 murid per guru. Sebenarnya, tanpa pengangkatan GTT pun rasio murid dan guru PNS masih sekitar 30 murid per guru. Angka ini masih memungkinkan guru PNS untuk mengelola kelas dengan baik (lihat Permendikbud No. 23 Tahun 2013). Akan tetapi, jumlah murid dan jumlah guru PNS sangat beragam antarsekolah. Meskipun rasio guru dan murid di tingkat kabupaten memadai, di tingkat sekolah rasionya belum berimbang; banyak sekolah masih kekurangan guru kelas dan mata pelajaran.

<sup>7</sup> PGRI: Persatuan Guru Republik Indonesia; PGTTI: Perhimpunan Guru Tidak Tetap Indonesia; FGII: Federasi Guru Independen Indonesia.

## 2.2.2 Kualitas Guru yang Rendah

Pada umumnya latar belakang pendidikan guru, baik PNS maupun GTT, adalah tamatan S-1 dari berbagai perguruan tinggi (PT) atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Namun, sebagian di antara mereka tidak memiliki kualifikasi yang memadai. Banyak informan menilai bahwa banyak guru tidak menguasai didaktik-metodik,<sup>8</sup> bahkan tidak menguasai materi ajar. Penyebabnya adalah, antara lain, kurang berkualitasnya PT/LPTK tempat mereka dididik dan rendahnya motivasi mengajar guru-guru tersebut.

Di satu sisi, akhir-akhir ini di daerah studi banyak bermunculan LPTK, termasuk yang menyediakan proses belajar jarak jauh. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan terkait LPTK seperti tidak adanya standar kualitas LPTK, mudahnya perizinan pendirian LPTK, dan belum adanya standardisasi pendidikan guru di LPTK swasta (Kompas, 2013)<sup>9</sup>. Di sisi lain, banyak guru PNS kuliah sekadar formalitas untuk mengejar gelar S-1 yang merupakan persyaratan utama untuk dapat mengikuti program sertifikasi guru.

Sementara itu, proses rekrutmen GTT, terutama di tingkat sekolah, hanya berdasarkan pada pemahaman masing-masing kepala sekolah tanpa adanya standar perekrutan yang jelas dan sarat dengan berbagai kepentingan. Akibatnya, kualitas GTT yang dihasilkan juga rendah. Banyak GTT tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjana kependidikan atau mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keilmuannya.

## 2.2.3 Pelatihan Guru yang Kurang

Kurangnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan guru diperbincangkan di semua daerah. Seorang pengawas sekolah membuat ungkapan tentang guru, “seperti motor tua yang sejak keluar dari *dealer* [penjual] tidak pernah diservis.” Meskipun demikian, hal tersebut bukan berarti bahwa guru tidak memiliki saluran untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan diri. Pengawas sekolah biasanya melakukan pembinaan, memotivasi guru, dan memberi masukan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Pelatihan dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman dan kreativitas guru dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) secara normatif juga tersedia melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Hanya saja, banyak kepala sekolah tidak memfasilitasi kegiatan yang menunjang peningkatan profesionalisme guru tersebut karena sebagian besar dana yang tersedia dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipakai untuk membayar honor GTT dan membiayai kegiatan lain sekolah. Alokasi dana untuk peningkatan profesionalisme guru terabaikan dan para guru pun umumnya enggan melakukannya secara swadaya. Akibatnya, kegiatan KKG dan MGMP kebanyakan tidak aktif, kecuali yang mendapatkan dukungan dana secara khusus. Di Kabupaten Sumbawa Barat, misalnya, salah satu KKG yang aktif merupakan binaan pemerintah provinsi dan mendapatkan bantuan dana dari sebuah perusahaan swasta setempat.

Selain kepala sekolah, pemerintah daerah (pemda) juga kurang memperhatikan pengembangan profesionalisme guru. Tidak ada program pelatihan guru yang memadai dengan alasan terbatasnya sumber daya. Kegiatan pelatihan bagi guru yang relatif tersedia dalam dua tahun terakhir ini adalah pelatihan bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang diadakan Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama. Sementara itu, kesempatan untuk mengikuti pelatihan bagi guru bidang studi lain terbatas dan tidak merata. Di sebuah SMP di Bima, misalnya, dalam lima tahun terakhir hanya ada dua guru yang pernah mengikuti pelatihan.

---

<sup>8</sup>Pengetahuan tentang metode mengajar dan belajar yang efektif. Didaktik adalah ilmu tentang masalah mengajar dan belajar secara efektif; metodik adalah pengetahuan tentang metode mengajar.

<sup>9</sup>Jumlah keseluruhan LPTK adalah 370, dan 34 di antaranya merupakan LPTK negeri.

Kegiatan pelatihan pun cenderung dilaksanakan asal jadi, tecermin dari waktu yang singkat dan materinya kurang bervariasi (sering kali tentang urusan administrasi bukan pengajaran). Peserta pelatihan biasanya hanya guru PNS yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan dan yang sudah dikenal sehingga peserta pelatihan terbatas pada guru “itu-itu saja” (Bima, Lombok Tengah, Lombok Utara).<sup>10</sup> Kondisi tersebut makin terlihat pada pelatihan-pelatihan yang mensyaratkan agar peserta sudah menguasai teknologi tertentu (seperti di Dompu).

Pelatihan yang masih hangat dibicarakan di daerah adalah pelatihan tentang Kurikulum 2013. Materi pelatihan tersebut lebih banyak mengulas teknis pelaporan dan kurang menyentuh didaktik-metodik. Sebagai hasilnya, pelatihan tidak banyak mengubah praktik guru dalam pengelolaan pembelajaran murid. Guru yang menjadi peserta pelatihan ini juga cenderung tidak menyebarkan pengetahuan yang diperoleh kepada rekan-rekan guru di sekolahnya masing-masing. Berdasarkan hasil FGD dan wawancara di tingkat kabupaten, kondisi tersebut diperparah dengan tidak aktifnya sebagian besar KKG dan MGMP sehingga murid-murid mereka tidak terpapar cara-cara belajar aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

#### 2.2.4 Motivasi dan Profesionalisme Guru yang Rendah

Guru juga dinilai berkomitmen rendah terhadap profesinya. Selain tidak memiliki kemauan kuat untuk meningkatkan kemampuannya secara mandiri, guru memiliki motivasi yang rendah untuk menjadi pendidik berkualitas. Sebagian besar guru juga dinilai memiliki minat baca yang rendah. Mereka tidak berupaya untuk mengikuti isu-isu pendidikan terkini atau mempelajari metode pembelajaran yang baru. Dalam KBM, banyak guru mengerjakan tugas hanya demi memenuhi persyaratan jumlah jam mengajar. Masalah guru yang tidak disiplin juga acap kali disampaikan para informan. Kepemimpinan kepala sekolah yang kurang berkualitas dan pengawasan terhadap guru yang lemah diduga turut berkontribusi pada rendahnya motivasi guru. Sebagai akibatnya, guru tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Misalnya, guru kurang menguasai pembuatan atau bahkan tidak membuat kriteria ketuntasan minimal (KKM) atas kompetensi dasar yang harus dikuasai murid. Kalau pun ada guru yang menyusun KKM, kebanyakan dari mereka menetapkan target rendah, misalnya 60% saja, padahal idealnya 90% ke atas.

#### 2.2.5 Anggaran dan Infrastruktur Pendidikan yang Kurang

Seperti telah disampaikan oleh para informan, sarana dan prasarana sekolah di semua daerah studi umumnya masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari kurangnya jumlah ruang, kursi, dan meja yang dibutuhkan, serta buruknya kondisi bangunan. Perlengkapan lain, seperti alat peraga, buku perpustakaan, dan peralatan laboratorium, juga masih sedikit. Buku pelajaran pun masih kurang. Dana BOS dinilai belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan sekolah. Selain jumlahnya kurang, pendistribusian bantuan sarana dan prasarana sekolah juga tidak merata antarsekolah. Di Kabupaten Bima, misalnya, ada sekolah yang sering mendapat tambahan peralatan sekolah, tetapi ada pula sekolah yang jarang menerimanya. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya pengaruh kedekatan sosial dan politik dalam penentuan sekolah yang akan mendapatkan bantuan. Selain itu, anggaran daerah terbatas sehingga muncul mekanisme pemilihan sekolah sasaran dan tidak semua sekolah menerima bantuan. Sementara itu, di Sumbawa Barat, bantuan dari sebuah perusahaan swasta setempat berupa buku mata pelajaran hanya diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada di sekitar lokasi perusahaan tersebut.

---

<sup>10</sup>Dinas tidak memiliki basis data guru yang lengkap.

## 2.2.6 Perhatian dan Dukungan Orang Tua yang Rendah

Di sebagian wilayah studi, bukti kurangnya perhatian dan dukungan orang tua adalah adanya sebagian orang tua yang mengajak anaknya untuk bekerja pada waktu-waktu tertentu, seperti pada musim panen, di kebun/sawah. Hal ini berkonsekuensi anak-anak mereka tidak masuk sekolah selama satu hingga beberapa hari. Selain itu, ada anak-anak yang putus sekolah karena pernikahan dini. Hal ini terjadi terutama di kalangan masyarakat perdesaan, berpendidikan rendah, dan memiliki keterbatasan ekonomi. Orang tua yang sibuk bekerja di luar rumah, bahkan di luar negeri, biasa meninggalkan rumah untuk waktu yang lama sehingga tidak sempat memperhatikan apa yang dilakukan anak mereka di sekolah/lingkungannya. Masih ada anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan dan mandi terlebih dahulu. Orang tua juga umumnya menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah. Mereka kurang memotivasi anak untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok murid SD, sebagian murid mengaku tidak mendapat bimbingan orang tua ketika belajar di rumah karena orang tua mereka sibuk bekerja atau tidak memahami mata pelajaran anaknya. Murid SMP yang belajar di rumah pun umumnya menyatakan hanya belajar sendiri tanpa bimbingan orang tua. Orang tua hanya menyuruh mereka belajar tanpa memberikan pendampingan.

## 2.2.7 Minat Belajar Murid yang Rendah

Rendahnya minat belajar murid disampaikan oleh informan di semua kabupaten. Hal tersebut juga terdeteksi dari hasil wawancara dengan kelompok murid (perempuan dan laki-laki). Minat belajar murid dipengaruhi oleh cara guru mengajar. Murid cenderung menyukai pelajaran yang cara mengajar gurunya “enak”.<sup>11</sup> Selain karena faktor gurunya, murid juga menilai pelajaran Bahasa Indonesia dan terutama Matematika sulit.

Rendahnya minat belajar murid disebabkan pula oleh faktor lingkungan murid itu sendiri, seperti rendahnya dukungan orang tua dan keluarga, dampak penggunaan telepon cerdas (*smart phone*) dan permainan (*game*) yang perkembangannya sudah di luar kendali, dan pengaruh televisi. Mereka juga mudah terpengaruh perilaku buruk teman-temannya. Hal tersebut secara nyata menyebabkan murid tidak termotivasi untuk belajar dan membaca.

## 2.2.8 Pengaruh Kepentingan Politik yang Kuat

Persoalan lainnya adalah kuatnya pengaruh politik dalam rekrutmen, penempatan, dan pergeseran berbagai posisi di lingkungan pendidikan, termasuk guru dan kepala sekolah. Mutasi atau kabar akan adanya mutasi kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, dan posisi lainnya terjadi setiap usai pilkada.<sup>12</sup> Selain itu, calon kepala daerah sering menjadikan penyediaan lapangan pekerjaan seluas-luasnya sebagai janji politik saat kampanye menjelang pilkada. Profesi guru adalah salah satu pilihan pekerjaan untuk memenuhi janji kampanye tersebut. Politisasi profesi guru seperti ini mengganggu sistem rekrutmen dan distribusi guru. Hal yang membuat resah adalah bahwa keputusan mutasi/rotasi guru tersebut dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kompetensi guru atau hasil pemantauan pengawas sekolah. Situasi ini mengganggu gairah kerja guru-guru yang pada

---

<sup>11</sup>Dalam wawancara kelompok murid terungkap bahwa ada guru yang suka menyuruh seorang murid menulis catatan di papan tulis, kemudian murid lain menyalinnya. Gurunya sendiri ke luar kelas seperti untuk merokok. Akibatnya, murid kehilangan minat belajar. Mereka lebih menyenangi guru yang mau menjelaskan pelajaran berulang-ulang sampai murid paham, memberi kesempatan bertanya, atau menyelengi pelajaran dengan humor.

<sup>12</sup>Di Lombok Tengah dan Bima, ada tim sukses yang mendatangi sekolah untuk menawari guru/kepala sekolah peluang mutasi ke sekolah yang lebih baik, tetapi mereka harus membayar.

waktu pilkada tidak mendukung bupati terpilih.<sup>13</sup> Bentuk gangguan lain yang berpengaruh pada penyediaan guru berkualitas adalah pengangkatan guru PNS berkualitas menjadi pejabat struktural di berbagai satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), seperti halnya yang terjadi di Sumbawa Barat dan Lombok Tengah.

### 2.2.9 Pembelajaran Murid yang Tidak Tuntas

Masalah ini dikemukakan oleh informan di Bima, Lombok Tengah, dan Dompu. Pembelajaran konvensional yang cenderung memperlakukan semua murid dalam satu kelas sebagai kelompok homogen menimbulkan masalah besar berupa ketidaktuntasan belajar murid karena penguasaan pelajaran dan cara belajar murid berbeda-beda. Ketuntasan belajar murid yang tidak tercapai seharusnya diperbaiki melalui kegiatan pembelajaran tambahan atau remedial. Dalam banyak kasus, hal itu tidak dipenuhi dan ketidaktuntasan belajar murid dibiarkan tanpa remedial. Di sekolah-sekolah di Bima dan Lombok Tengah, misalnya, murid dinaikkan ke kelas berikutnya atau diluluskan walaupun belum memenuhi KKM. Alasannya adalah untuk memenuhi target tingkat kenaikan kelas dan kelulusan, serta untuk menghindari protes orang tua atau kejadian anak putus sekolah. Sebagian informan pada kelompok pelaksana kebijakan acap kali menganggap ketidaktuntasan belajar murid sebagai kesalahan murid atau orang tua. Di Dompu, ketidaktuntasan belajar murid juga dikaitkan dengan seringnya murid mengisi kegiatan perayaan di tingkat kabupaten, seperti ulang tahun kabupaten, yang menyebabkan mereka meninggalkan jam pelajaran selama sehari-hari.

Pengabaian ketidaktuntasan belajar murid hampir pasti akan membuat hasil pembelajaran murid rendah dan sekaligus menjadi beban bagi guru di kelas atau jenjang sekolah berikutnya. Di beberapa wilayah atau sekolah, upaya untuk mengejar ketuntasan belajar murid SD sudah dilakukan meskipun terbatas dan untuk kelas rendah (1–3). Di Sumbawa Barat, dilakukan pendampingan bagi murid-murid kelas 3 yang belum menguasai keterampilan membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Di sebuah SD di Bima, kegiatan yang sama juga dilakukan untuk murid-murid kelas 1–3. Di Dompu, pada 2008–2010, terdapat program remedial calistung yang dikaitkan dengan pakta integritas antara Dinas Pendidikan dan kepala sekolah sejumlah SD. Namun, program pendampingan langsung guru kepada murid tersebut tidak berlanjut dengan digantinya kepala Dinas Pendidikan, kecuali di beberapa sekolah.

### 2.2.10 Pengawasan terhadap Sekolah yang Lemah

Hal ini secara eksplisit diungkapkan oleh para informan di Lombok Tengah dan Lombok Utara. Para pengawas sekolah dinilai masih belum melakukan supervisi akademik dengan baik, terutama dalam hubungannya dengan masalah kualitas guru. Selain kapasitas para pengawas sekolah yang masih rendah, perbandingan jumlah pengawas sekolah dan jumlah sekolah juga masih timpang. Kepala sekolahnya pun masih banyak yang belum menjalankan tugas pengawasan sebagaimana mestinya; bahkan, sekadar melakukan kegiatan kecil seperti berkeliling menengok proses pembelajaran di kelas pun jarang dilakukan. Kondisi ini disebabkan, antara lain, oleh banyaknya tugas terkait urusan administrasi sekolah yang menjadi beban kepala sekolah dan para guru.

Idealnya, masalah di setiap sekolah bisa diatasi melalui tindak lanjut laporan hasil pengawasan dari pengawas sekolah yang telah diverifikasi oleh kepala UPTD dan/atau kepala Dinas Pendidikan. Namun, terlepas dari rendahnya kapasitas pengawas sekolah, terdapat kecenderungan bahwa laporan pengawas sekolah di semua daerah tidak mendapat perhatian Dinas Pendidikan.

---

<sup>13</sup>Kepala daerah terpilih mempunyai kewenangan untuk melakukan mutasi PNS di wilayahnya enam bulan setelah ia dilantik.

## 2.3 Komunikasi di antara dan antarpemangku Kepentingan

Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pembelajaran murid, nyaris tidak ditemukan penggunaan teknologi komunikasi yang intensif, berpola, dan berkelanjutan. Gejala ini terjadi dan disampaikan informan di semua tingkat di berbagai daerah, yaitu di Dinas Pendidikan, UPTD, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Komunikasi yang terjalin lebih banyak mengandalkan tatap muka, seperti rapat kerja, pelatihan, atau kunjungan langsung. Komunikasi horizontal Dinas Pendidikan, DPRD, SKPD lain, Dewan Pendidikan, organisasi nonpemerintah (ornop), dan organisasi masyarakat sipil (OMS) kebanyakan dilakukan melalui surat resmi dan tatap muka. Media teknologi komunikasi berupa telepon atau telepon genggam hanya digunakan untuk mengundang peserta pertemuan, baik dengan menelepon langsung maupun melalui layanan pesan singkat (*short message service*, SMS). Itu pun masih sering dibarengi dengan pengiriman surat undangan tertulis.

Penggunaan aplikasi media sosial sebagai alat komunikasi di antara dan antarpemangku kepentingan pendidikan masih dipandang “tidak pantas”. Jika pun ada kelompok yang berkomunikasi menggunakan media sosial, seperti WhatsApp, jumlahnya masih terbatas. Salah satu grup WhatsApp yang aktif adalah grup MGMP Bahasa Inggris di Kabupaten Sumbawa. Melalui grup ini, guru-guru bidang studi Bahasa Inggris bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman. Hal serupa dilakukan juga oleh Badan Pembangunan dan Perencanaan Daerah (Bappeda) Sumbawa melalui grup WhatsApp Peduli Pendidikan yang beranggotakan pemangku kepentingan tingkat kabupaten.

Meskipun jarang dilakukan, komunikasi orang tua dengan guru atau pihak sekolah biasanya dilakukan melalui tatap muka. Orang tua lebih memilih datang langsung kepada guru di sekolah jika ada keperluan terkait anaknya, seperti memberi tahu alasan ketidakhadiran anaknya. Komunikasi guru dengan murid juga masih terbatas melalui tatap muka meskipun banyak murid memiliki telepon genggam. Kebanyakan sekolah melarang murid membawa telepon genggam ke sekolah. Mayoritas informan juga mengkhawatirkan dampak negatif penggunaan telepon genggam oleh murid. Berbagai peristiwa kenakalan remaja sering dikaitkan dengan penyalahgunaan media sosial, telepon genggam, dan televisi.

Namun, pengalaman sebuah SMP di Lombok Tengah menunjukkan bahwa telepon genggam dapat dimanfaatkan untuk membangun komunikasi antara guru dan murid. Menjelang Ramadan, kepala sekolah di SMP tersebut memberitahukan nomor telepon genggam guru PAI kepada murid-murid dan mempersilakan mereka untuk bertanya tentang apa saja terkait agama, khususnya materi mengenai puasa, melalui SMS. Tidak disangka, setiap hari ratusan SMS diterima guru PAI. Namun, saluran komunikasi guru dan murid dengan model ini berhenti begitu saja; tidak ada yang melanjutkan dan mengembangkannya. Di sebuah SD di Bima, juga terjalin komunikasi guru dan murid melalui telepon genggam. Murid-murid di SD tersebut biasa bertanya kepada guru di luar jam sekolah melalui SMS jika ada permasalahan terkait pelajaran.

Terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran, di sebuah SMP di Kabupaten Sumbawa Barat, seorang guru Bahasa Inggris memanfaatkan wahana daring (*online platform*) gratis, yaitu Quipper School, untuk memberi tugas dan ujian harian kepada murid-murid. Mekanisme ini baru diperkenalkan kepada murid Kelas IX pada 2016. Murid dapat mengakses teknologi ini melalui komputer di sekolah. Melalui program ini, guru dapat mengelola kelas dan melihat perkembangan pembelajaran murid secara daring.

## III. ANALISIS INOVASI PEMBELAJARAN DI DAERAH

### 3.1 Inisiatif Daerah

Inisiatif daerah untuk membangun kebijakan/program/inovasi lokal terkait pendidikan, khususnya pembelajaran, ditemukan di semua kabupaten studi. Jumlah inovasi pembelajaran inisiatif daerah tersebut bervariasi antarkabupaten. Kabupaten dengan jumlah inovasi pembelajaran inisiatif daerah paling banyak secara berturut-turut adalah Sumbawa Barat, Sumbawa, Lombok Utara, Bima, Dompu, dan Lombok Tengah. Selain jumlahnya, inovasi daerah juga bervariasi dalam hal penggagas, pelaksana, bentuk, sumber dana, sifat, periode pelaksanaan, cakupan, sasaran, dan dampaknya, baik antarkabupaten maupun antarinovasi.<sup>14</sup> Rangkuman mengenai bentuk inovasi di enam kabupaten studi dapat dilihat pada Lampiran 2.

Lembaga penggagas inovasi daerah biasanya bertindak juga sebagai pelaksana, bahkan sekaligus sebagai penyedia dana. Berdasarkan penggagasnya, inovasi daerah dapat dibedakan menjadi inovasi (i) pemda dengan penggagas utama bupati dan/atau Dinas Pendidikan setempat dan didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten; (ii) ornop yang pendanaannya didukung, antara lain, oleh perusahaan; (iii) perusahaan dalam bentuk bantuan langsung bagi sekolah; dan (iv) sekolah yang digagas oleh kepala sekolah/guru dan umumnya sudah menjadi bagian dari kegiatan rutin sekolah.

Di semua kabupaten sampel ditemukan inovasi yang digagas pemda, baik berupa hasil replikasi program pusat atau provinsi maupun murni gagasan daerah. Pemda yang relatif banyak berinovasi berturut-turut adalah Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, dan Lombok Utara. Ada satu bentuk inovasi pemda yang dikembangkan di Kabupaten Sumbawa (sejak 2009) dan Sumbawa Barat (Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat), yaitu Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang merupakan replikasi dari Program BOS. Bentuk inovasi pemda lainnya adalah, antara lain, pemberian insentif bagi guru terpencil dan madrasah (di Sumbawa sejak 2010), peningkatan kapasitas guru (di Lombok Utara sejak 2008, di Sumbawa sejak 2008, di Bima sejak 2014, dan di Lombok Tengah pada 2006–2010), serta penambahan tenaga guru kontrak dan pembangunan perpustakaan (di Bima sejak 2014). Pemda Kabupaten Sumbawa juga mengaktifkan Jurnal Pendidikan Samawa dan Jurnal Cendekia sebagai wadah bagi para guru untuk mengembangkan kemampuan menulis ilmiah. Seperti disinggung sebelumnya, di Kabupaten Dompu pada 2008–2010 terdapat program remedial calistung berupa pendampingan langsung guru kepada murid.

Pemda di empat kabupaten sampel juga mendapat bantuan dari donor luar negeri dalam menggagas, mendanai, dan melaksanakan programnya. Pemda Kabupaten Bima (2014–2015) bekerja sama dengan Pemerintah Australia dalam melaksanakan program Pengembangan Keprofesian Tenaga Kependidikan (Professional Development for Education Personnel, ProDEP). Pemda Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat bekerja sama dengan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram dan Universitas Canberra dalam menyelenggarakan pengembangan profesional dan kapasitas guru untuk meningkatkan pembelajaran matematika para murid yang dikenal dengan *experience, language, pictorial, symbolic, dan application* (ELPSA). Sementara itu,

---

<sup>14</sup>Informasi lebih lengkap tentang inovasi daerah setiap kabupaten studi dapat dilihat pada laporan survei diagnostik pembelajaran pendidikan dasar masing-masing kabupaten (tersedia di situs web SMERU).

Pemda Kabupaten Lombok Tengah—melalui bantuan Bank Dunia—melaksanakan program praktik baik dalam pendidikan (2006–2010).

Inovasi yang digagas ornop lebih banyak ditemukan di Sumbawa Barat dan Lombok Utara yang pendanaannya didukung, antara lain, oleh perusahaan swasta yang beroperasi di kedua kabupaten tersebut. Di Sumbawa Barat, sejak 2012 sebuah ornop mendirikan rumah baca di salah satu desa dampingan untuk meningkatkan minat baca anak. Ornop tersebut juga bekerja sama dengan sebuah perusahaan swasta setempat dalam menggagas beberapa inovasi seperti pendampingan perpustakaan dan majalah dinding sekolah (melalui penyelenggaraan pelatihan pustakawan dan studi banding), serta penambahan koleksi perpustakaan sekolah pada 2007. Pada 2015, ornop tersebut melaksanakan pelatihan peningkatan mutu guru dan pendampingan bagi guru yang akan membimbing murid peserta olimpiade sains. Di Lombok Utara, ada ornop yang mendapat bantuan pendanaan, antara lain, dari dua perusahaan swasta. Ornop tersebut juga mengelola taman bacaan di satu sekolah yang dibangun Dinas Pekerjaan Umum setempat. Di Lombok Utara, juga ada ornop yang pernah memberikan bantuan langsung ke sekolah dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk guru dan pengadaan fasilitas sekolah inklusif.

Selain bekerja sama dengan ornop lokal, perusahaan yang berkiprah di Sumbawa Barat dan Lombok Utara turut menggagas inovasi/program yang langsung diberikan kepada sasaran. Di Sumbawa Barat, sebuah perusahaan swasta setempat memberikan beasiswa kepada murid berprestasi dan murid miskin pada 1998–2014 yang disampaikan melalui sekolah. Saat ini beasiswa tersebut diberikan melalui pengajuan permohonan langsung dari murid kepada perusahaan. Perusahaan juga memberikan bantuan pembebasan lahan dan pembangunan sekolah bagi masyarakat di wilayah sekitar tambang. Sementara itu, sebuah bank BUMN di Lombok Utara memberi bantuan dana kepada pemda untuk menunjang kegiatan MGMP. Di kabupaten tersebut, ada pula perusahaan lokal yang memberikan bantuan melalui asosiasi perusahaan lokal berupa dana untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di kawasan tersebut. Kiprah ornop dan perusahaan secara nyata menjadi pendorong relatif banyak inovasi yang dilaksanakan di Sumbawa Barat dan Lombok Utara.

Inovasi di bidang pendidikan dari ornop juga ditemukan di kabupaten lain. Di Sumbawa, Lembaga Psikologi Pelangi Harapan (LPPH), Universitas Teknologi Sumbawa, pada 2013 mendirikan Sekolah Komunitas untuk mendorong minat belajar para joki cilik. Di Dompu diperoleh informasi bahwa ornop Plan Indonesia-Unit Dompu pernah memberikan pelatihan kepada guru di beberapa sekolah terpilih tentang cara mengajar yang menyenangkan bagi murid; program tersebut berakhir pada sekitar 2011/2012 (Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan Dompu, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara di tingkat sekolah, terdapat inovasi pembelajaran yang merupakan inisiatif sejumlah sekolah sampel di kabupaten studi, kecuali Kabupaten Lombok Utara. Salah satu bentuk inovasi sekolah adalah penyelenggaraan pendampingan langsung guru kepada murid yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi rendah. Inovasi ini ditemukan setidaknya di satu sekolah sampel di Sumbawa Barat pada 2015, Bima, dan Dompu. Selain itu, terdapat juga inovasi berupa penyelenggaraan latihan pidato/ceramah di beberapa sekolah di Lombok Tengah dan Dompu (sejak 2015). Di sebuah SMP sampel di Lombok Tengah, juga terdapat kegiatan membaca selain buku ajar selama sepuluh menit sebelum kelas dimulai. Bentuk inovasi lain di tingkat sekolah adalah penyelenggaraan rapat untuk berbagi pengalaman antarguru (di Sumbawa Barat sejak 2014 dan Bima); pembentukan komite sekolah per dusun (di Sumbawa); ulangan dengan sistem buku terbuka (*open book*) (di Dompu sejak 2016/2017); penggunaan Quipper School yang digagas seorang guru di sebuah SMP sampel (di Sumbawa Barat); dan penggunaan penampil kristal cair (*liquid crystal display*, LCD) dalam kegiatan belajar mengajar (di Bima sejak 2015).

Secara umum, periode pelaksanaan inovasi yang digagas pemda dapat dibedakan atas program yang diselenggarakan sesuai dengan masa jabatan bupati saat inovasi diluncurkan dan program lanjutan dari bupati sebelumnya. Inovasi yang digagas perusahaan biasanya dilaksanakan selama periode waktu tertentu, tetapi ada juga yang kemudian berlanjut dalam bentuk bantuan yang berbeda. Inovasi yang diadakan ornop umumnya diselenggarakan selama periode tertentu dengan kepastian keberlanjutan yang sangat bergantung pada pemberi dana. Sementara itu, sebagian inovasi yang digagas sekolah merupakan inovasi lama yang sudah dijalankan secara rutin dan sebagian lainnya merupakan inovasi baru dari kepala sekolah yang sedang menjabat.

## 3.2 Sasaran dan Dampak INOVASI

Berdasarkan sasarannya, inovasi dapat dibedakan menjadi inovasi untuk murid, guru, dan manajemen sekolah. Bentuk inovasi berdasarkan sasarannya serta perkiraan dampaknya terhadap pembelajaran dapat dirangkum sebagai berikut.

### a) Inovasi untuk murid:

- (1) Membantu murid meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi melalui pendampingan langsung di kelas, pelatihan pidato/ceramah dalam bahasa Indonesia, dan peningkatan literasi murid/anak di luar sekolah. Inovasi ini diperkirakan dapat mendorong minat belajar murid yang diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, serta rasa percaya diri murid. Namun, di sebagian daerah dampaknya belum terlihat karena kegiatannya terhenti.
- (2) Membangun sarana pendukung pembelajaran seperti taman/rumah baca, perpustakaan, majalah dinding sekolah, serta dekorasi ruang kelas. Karena inovasi tersebut baru pada tahap meningkatkan sarana pembelajaran, dampaknya terhadap pembelajaran murid belum terlihat.
- (3) Pemanfaatan teknologi dalam KBM berupa penggunaan LCD, telepon genggam, dan internet (Quipper School). Inovasi ini belum secara konsisten dilakukan sehingga dampaknya terhadap pembelajaran belum terlihat, tetapi inovasi ini diakui mampu menghemat penggunaan alat tulis.
- (4) Peningkatan bantuan biaya sekolah melalui BOSDA, beasiswa murid, dan seragam gratis. Dampak dari inovasi ini belum bisa dilihat dan dananya dinilai terlalu kecil.

### b) Inovasi untuk guru:

- (1) Mengatasi kekurangan tenaga guru di daerah terpencil melalui penyediaan tenaga guru kontrak khusus. Upaya ini baru berdampak pada peningkatan kuantitas guru.
- (2) Peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan di luar negeri, peningkatan kegiatan MGMP/KKG, peningkatan kemampuan menulis artikel jurnal dan forum ilmiah, serta penyediaan ruang berbagi ilmu. Inovasi ini dinilai mampu memperkaya pengetahuan guru, terutama dalam penyusunan RPP; meningkatkan semangat menulis; dan menginspirasi untuk lebih semangat dalam mengajar.
- (3) Peningkatan insentif guru non-PNS di daerah terpencil dan guru madrasah. Inovasi ini dapat mendorong minat guru untuk mengajar di daerah terpencil dan meningkatkan kesejahteraan guru madrasah.

### c) Inovasi untuk manajemen sekolah:

- (1) Mendorong peran aktif masyarakat melalui pembentukan komite sekolah per dusun dan forum komite sekolah di kecamatan. Inovasi ini dapat mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anaknya.
- (2) Memperbaiki mutu kepemimpinan dan pengelolaan sekolah umum dan madrasah. Inovasi ini dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan sekolah dan penyusunan rencana kerja sekolah.

Untuk mengetahui adanya hubungan sebab-akibat antara jumlah inovasi dan kondisi pendidikan di tingkat kabupaten, diperlukan banyak bukti yang diperoleh dengan menggunakan metodologi yang tepat. Namun, karena faktor kebetulan atau bukan, Sumbawa Barat yang memiliki jumlah inovasi/program terkait pembelajaran murid paling banyak ternyata memiliki profil pendidikan terbaik di antara seluruh wilayah studi. Seperti yang telah diulas pada Bab I, angka putus sekolah tingkat SD, nilai rata-rata kompetensi guru, nilai rata-rata ujian nasional SD/MI, dan indeks pembangunan manusia di Sumbawa Barat sedikit lebih baik daripada di kabupaten lainnya.

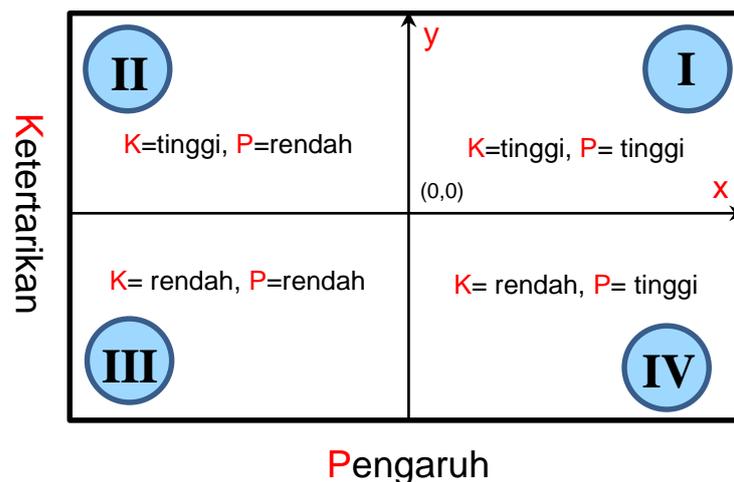
# IV. PEMANGKU KEPENTINGAN PEMBELAJARAN: KETERTARIKAN DAN PENGARUH

## 4.1 Pengantar

Pemangku kepentingan di bidang pendidikan, khususnya terkait kebijakan pembelajaran, berdasarkan tugas dan fungsinya, dapat dikelompokkan ke dalam (i) pembuat kebijakan, (ii) pelaksana kebijakan, dan (iii) pendukung pelaksanaan kebijakan. Secara umum, kelompok pembuat kebijakan terdiri atas bupati, DPRD, Dinas Pendidikan, sekretaris daerah (setda), dan Bappeda. Kelompok pelaksana kebijakan terdiri atas UPTD, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru. Kelompok pendukung pelaksanaan kebijakan terdiri atas Dewan Pendidikan, PGRI, orang tua, komite sekolah, kepala desa, ornop, dan media. Pada kondisi tertentu, posisi lembaga tersebut dapat bergeser atau merangkap, seperti kepala sekolah dapat menjadi pembuat kebijakan di internal sekolahnya. Demikian juga dengan perusahaan dan ornop yang dapat menjadi pembuat dan pelaksana kebijakan untuk program mereka sendiri.

## 4.2 Ketertarikan dan Pengaruh

Setiap kelompok pemangku kepentingan menunjukkan ketertarikan untuk terlibat dan memberikan pengaruh aktual yang berbeda terhadap pembelajaran murid. Kombinasi ketertarikan dan pengaruh tersebut dipetakan dengan menggunakan model kuadran yang dibahas dan disetujui dalam FGD tingkat kabupaten (Gambar 1). Kombinasi ketertarikan dan pengaruh setiap lembaga di setiap kabupaten bervariasi. Namun, ada kecenderungan umum sebagaimana dijelaskan pada model kuadran berikut.



Gambar 1. Model kuadran ketertarikan dan pengaruh

### **a) Bupati, DPRD, dan SKPD terkait kebijakan pembelajaran**

Secara normatif bupati dan DPRD adalah pembuat kebijakan tertinggi di daerah dengan mendapat masukan dari SKPD terkait sebagai bahan pertimbangan utama. Beberapa SKPD yang relevan dengan kebijakan pembelajaran adalah Dinas Pendidikan, setda, dan Bappeda. Bupati dan DPRD cenderung dimasukkan ke dalam Kuadran I atau dinilai memiliki tingkat ketertarikan dan pengaruh yang tinggi terhadap pembelajaran, kecuali Bupati Dompu dan Bupati Lombok Tengah yang tidak didiskusikan dalam FGD. Lembaga tersebut dapat mengeluarkan kebijakan yang mengikat organisasi bawahannya dan sangat menentukan besarnya alokasi anggaran.

Di satu sisi, bupati dan DPRD di semua daerah menunjukkan keinginan untuk memperbaiki pembelajaran murid. Hal tersebut tecermin dalam visi dan misi, serta tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, di sisi lain, realisasinya dapat diukur dari seberapa nyata kebijakan tersebut dilaksanakan dan seberapa besar alokasi anggaran pendidikan disediakan APBD. Dalam hal ini, semua daerah mematok alokasi pendidikan pada angka minimal 20% yang bersumber dari Dana Alokasi Umum. Selain itu, tidak terlihat adanya penambahan dari dana Pendapatan Asli Daerah. Akan tetapi, sebagian besar anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk membayar gaji pegawai, termasuk guru. Alokasi gaji pegawai di Dompu mencapai 87%, di Lombok Tengah 91%, dan bahkan di Bima mencapai 97,6% dari total anggaran pendidikan. Fakta ini menimbulkan pertanyaan terhadap anggapan tingginya ketertarikan mereka pada pendidikan.

Dinas Pendidikan di seluruh wilayah studi menempati Kuadran I. Penilaian tingginya ketertarikan lembaga ini cenderung terbangun karena keterkaitan tugas dan fungsinya. Sementara itu, tingginya pengaruh lembaga ini disebabkan perannya sebagai penyedia data dan gagasan serta kewenangannya dalam mengelola lembaga bawahan seperti pengawas sekolah, UPTD, dan sekolah. Ketertarikan dan pengaruh Bappeda juga tinggi di sebagian besar wilayah studi karena lembaga ini merupakan lembaga perencana kebijakan. Meskipun demikian, perencanaan kebijakan yang dilakukan Bappeda akan bergantung pada program yang diajukan Dinas Pendidikan yang juga bergantung pada keputusan bupati dan/atau DPRD. Sementara itu, pengaruh setda terhadap pembelajaran murid tergolong netral dan dinilai sebagai bagian dari kelembagaan bupati.

### **b) Kepala sekolah dan guru**

Kepala sekolah dapat berposisi sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelaksana kebijakan. Kepala sekolah mempunyai peran strategis dalam menentukan dan menjaga mutu pembelajaran di sekolah. Hal tersebut tercantum, antara lain, dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. Namun, dalam praktiknya peraturan ini cenderung diabaikan. Kebijakan penempatan kepala sekolah juga banyak diintervensi pertimbangan pragmatis dan politis. Sementara itu, guru menempati posisi sebagai pelaksana kebijakan yang mempunyai ketertarikan serta pengaruh yang tinggi dan langsung terhadap pembelajaran murid. Guru adalah penentu hasil pembelajaran murid karena interaksinya yang intens dengan murid. Peran guru cukup menentukan apakah seorang murid akan menyukai dan memahami pelajaran, serta mampu memanfaatkannya dalam kehidupan. Namun, untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berkualitas, guru memerlukan dukungan, setidaknya dari kepala sekolah dan pengawas sekolah.

### **c) Pengawas sekolah dan UPTD**

Peserta FGD di sebagian kabupaten studi mengakui bahwa pada dasarnya pengawas sekolah dan UPTD mempunyai ketertarikan dan pengaruh yang tinggi terhadap pembelajaran murid (masuk ke dalam Kuadran I). Namun, mereka tidak memiliki kapasitas terkait penyediaan anggaran. Pengawas sekolah berperan penting dalam mengenali masalah yang muncul di sekolah, khususnya terkait

KBM, dan mencari pemecahannya. Akan tetapi, seperti disampaikan pada Bab II, terdapat kecenderungan bahwa laporan mereka tidak mendapat perhatian lembaga atasannya. Sekolah juga sering kali berhubungan langsung dengan Dinas Pendidikan tanpa melibatkan pengawas sekolah dan UPTD.

#### **d) Lembaga pendukung kebijakan pembelajaran**

Dewan Pendidikan, PGRI, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS)/KKG, ornop, OMS, media, dan dunia usaha berposisi sebagai pendukung pelaksanaan kebijakan pembelajaran. Ketertarikan dan pengaruh mereka terhadap pembelajaran murid bervariasi antarlembaga dan antarkabupaten. Posisi mereka tersebar di semua kuadran, tetapi ada kecenderungan bahwa mereka masuk ke dalam Kuadran II, yaitu kuadran dengan tingkat ketertarikan yang tinggi dan pengaruh yang rendah. Pengukuran realistis terhadap hal tersebut seharusnya bergantung pada kerja nyata setiap lembaga dalam upaya memperbaiki pembelajaran murid di wilayahnya.

#### **e) Orang tua, komite sekolah, kepala desa, dan warga di sekitar lingkungan sekolah**

Kelompok pemangku kepentingan di tingkat masyarakat juga termasuk ke dalam pendukung pelaksanaan kebijakan. Pada model kuadran, mereka masuk ke dalam Kuadran II, III, dan IV, dengan jumlah terbanyak di Kuadran III, yaitu kuadran dengan tingkat ketertarikan dan pengaruh yang rendah. Khusus di Dompu, komite sekolah dan kepala desa dinilai mempunyai tingkat ketertarikan dan pengaruh yang cukup tinggi karena lembaga ini sering ikut berkunjung ke rumah murid yang sering bolos sekolah. Sementara itu, orang tua umumnya dinilai tidak mampu membimbing pembelajaran anak secara langsung karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya kesibukan dalam mencari nafkah. Mereka cenderung menyerahkan urusan pendidikan anaknya kepada sekolah.

### **4.3 Pelibatan Aktor dan Koordinasi**

Berdasarkan uraian di atas, aktor utama yang perlu dilibatkan dalam program pengembangan pembelajaran murid di semua kabupaten adalah kepala sekolah dan guru. Mereka adalah pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab langsung terkait kegiatan pembelajaran murid di kelas/sekolah. Pengawas sekolah juga merupakan aktor utama meski dengan catatan perlu adanya peningkatan pemanfaatan hasil pengawasannya.

Pemangku kepentingan pembuat kebijakan tingkat kabupaten, seperti bupati, DPRD, Dinas Pendidikan, dan Bappeda, dibutuhkan keterlibatannya untuk menjamin adanya kebijakan yang mendukung atau melindungi pelaksanaan program perbaikan pembelajaran murid. Selanjutnya, Dewan Pendidikan, PGRI, dan lain-lain dapat berperan dalam memperkaya fasilitas pembelajaran murid, khususnya dalam meningkatkan kapasitas guru.

Komunikasi dan koordinasi antarpihak dapat dilakukan melalui tatap muka seperti biasa. Karena mereka rata-rata memiliki telepon genggam dan di beberapa SKPD telah dibuat kelompok-kelompok diskusi di media sosial, hal ini dapat lebih dimaksimalkan. Selain itu, di setiap sekolah terdapat petugas operator komunikasi (surat elektronik) yang dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien. Sementara itu, forum yang dapat didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam berkomunikasi adalah, antara lain, MKKS/KKG, MGMP, dan kelompok pengawas sekolah.

## V. PENUTUP

Ditinjau dari sisi kualitatif, masalah utama pembelajaran murid di daerah berkaitan erat dengan kualitas dan manajemen guru, khususnya guru tetap/PNS, yaitu berupa rendahnya kualitas guru, ketidakmerataan sebaran guru, rendahnya jumlah guru, kurangnya pelatihan bagi guru, rendahnya motivasi dan profesionalisme guru, lemahnya pengawasan terhadap guru, dan kuatnya kepentingan politik daerah dalam promosi dan mutasi guru. Inovasi pembelajaran murid telah dilakukan di semua daerah sampel dalam jumlah dan jenis yang beragam, tetapi inovasi tersebut umumnya tidak ditujukan untuk memperbaiki kualitas dan manajemen guru dalam rangka memperbaiki sistem pembelajaran. Untuk aspek tersebut, banyak daerah yang masih sangat bergantung pada kebijakan pusat, padahal pemangku kepentingan di daerah yang berkepentingan atau terkait dengan pembelajaran cukup banyak meskipun dengan tingkat perhatian, pemahaman, dan kepentingan yang beragam.

Perlu digarisbawahi bahwa masalah ketidaktuntasan belajar murid merupakan persoalan serius pada sistem pembelajaran karena menyebabkan banyak murid memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang rendah. Situasi ini diperparah oleh kenyataan bahwa di dalam kelas murid diperlakukan sebagai kelompok homogen, padahal kemampuan, kebutuhan, minat belajar, dan bakat setiap murid berbeda. Persoalan ketidaktuntasan belajar murid ini perlu dicarikan jalan keluar, antara lain, melalui (i) penyelesaian persoalan terkait kualitas dan manajemen guru untuk menghasilkan guru berkualitas dan profesional dalam jumlah cukup dan (ii) perbaikan sistem belajar mengajar yang mendukung peningkatan kemampuan literasi dan numerasi semua kelompok murid.

Provinsi NTB telah mendeklarasikan diri sebagai daerah pelaksana sekolah inklusi. Terlepas dari pelaksanaannya yang masih tertatih-tatih, usaha penyediaan akses pendidikan bagi semua kelompok murid ini perlu terus dikembangkan. Selain itu, studi diagnostik yang menggunakan pendekatan kualitatif ini membutuhkan dukungan studi kuantitatif agar dapat menyediakan informasi yang terukur tentang masalah pembelajaran, analisis inovasi, dan keterkaitan kelembagaan antarpemangku kepentingan tingkat pendidikan dasar di daerah.

## DAFTAR ACUAN

- Dinas Dikpora Kabupaten Bima (2014) 'Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Bima 2016–2020.' Data dalam *excel*, tidak dipublikasikan.
- Dinas Dikpora Kabupaten Dompu (2010) 'Renstra Dinas Dikpora Kabupaten Dompu 2010–2015.' Data dalam *excel*, tidak dipublikasikan.
- Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Tengah (2016) 'Data Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Tengah.' Data dalam *excel*, tidak dipublikasikan.
- Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Utara (2015) 'Basis Data Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Utara.' Data dalam *excel*, tidak dipublikasikan.
- Dinas Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat (2012) 'Buku Saku Pendidikan Tahun Ajaran 2012/2013.' Data dalam *excel*, tidak dipublikasikan.
- Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat (2015) 'Basis Data Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat.' Data dalam *excel*, tidak dipublikasikan.
- Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa (2013) 'Data Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Data dalam *excel*, tidak dipublikasikan.
- INOVASI (2016a) 'Hasil Literasi Numerasi NTB.' Data dalam *power point slides*, tidak dipublikasikan.
- . (2016b) 'Nusa Tenggara Barat: Potret Pendidikan Kabupaten 2015/6.' Data dalam lembaran, tidak dipublikasikan.
- Karnasih, Ida (2012) *Analisis Kesalahan Newman Pada Soal Cerita Matematis* [dalam jaringan] <<http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/paradikma/article/view/3352/3018>> [22 Juli 2016].
- Kemendikbud (2014) 'Gawat Darurat Pendidikan di Indonesia.' Bahan paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada Silaturahmi Kementerian dengan Kepala Dinas pada 1 Desember 2014 di Kemendikbud, Jakarta, tidak dipublikasikan.
- Kompas (2014) *Edukasi: Anies Baswedan Sebut Pendidikan Indonesia Gawat Darurat* [dalam jaringan] <<http://edukasi.kompas.com/read/2014/12/01/13455441/anies.baswedan.sebut.pendidikan.indonesia.gawat.darurat>> [20 Juli 2016].
- . (2013) *LPTK Belum Miliki Standar Kualitas* [dalam jaringan] <https://edukasi.kompas.com/read/2013/01/18/04311264/LPTK.Belum.Miliki.Standar.Kualitas> [20 Juli 2016].
- Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan Dompu (2010) *Kegiatan yang akan Dilaksanakan dan Mitra Kerja* [dalam jaringan] <<http://lmpdmpu.blogspot.co.id/2010/04/kegiatan-yang-sudah-dilaksanakan.html#!/tcmbck>> [22 Juli 2016].
- Hastuti (2016) 'Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.' Laporan Penelitian. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Utari, Valentina Y. D., Asep Kurniawan, dan Dedy Hermansyah (2016) 'Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.' Jakarta: The SMERU Research Institute.

Kurniawan, Asep, Syaikhu Usman, Valentina Y. D. Utari, dan Dedy Hermansyah (2016) 'Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.' Jakarta: The SMERU Research Institute.

Nurbani, Rachma Indah (2016) 'Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat.' Jakarta: The SMERU Research Institute.

Akhmadi, Rachma Indah Nurbani, Pitriati Solihah, dan Fathul Rahman (2016) 'Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.' Jakarta: The SMERU Research Institute.

Ruhmaniyati, Akhmadi, Pitriati Solihah, dan Saprudin (2016) 'Studi Diagnostik Pembelajaran Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.' Jakarta: The SMERU Research Institute.

Toyamah, Nina, Bambang Sulaksono, Meuthia Rosfadhila, Silvia Devina, Sirojuddin Arif, Stella Aleida Hutagalung, Eduwin Pakpahan, dan Asri Yusrina (2009) 'Survei *Baseline* Kehadiran Guru dan Bantuan Kesejahteraan untuk Guru di Daerah Terpencil.' Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Permendikbud No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.

Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Sumbawa Barat.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### Rangkuman Permasalahan Pembelajaran di Enam Kabupaten Sampel di Provinsi NTB dan Penilaian Tingkat Keyakinannya

Masalah Pembelajaran	Lombok Tengah	Lombok Utara	Sumbawa	Sumbawa Barat	Bima	Dompu
Kualitas guru rendah karena rekrutmen tidak efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kualitas guru dalam melakukan pengajaran rendah</li> <li>– Guru belum menguasai prinsip dan metode pembelajaran/pendidikan inklusif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kualitas guru dalam melakukan pengajaran rendah (penggunaan metode pembelajaran dengan media bantu kurang)</li> <li>– Kualifikasi pendidikan guru kurang sesuai dengan bidang ajar</li> <li>– Minat guru untuk belajar rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kualitas guru berbeda-beda bergantung pada lembaga pendidikan tempat mereka menimba ilmu</li> <li>– Kemampuan guru dalam mengajar berbeda-beda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kualitas guru masih rendah</li> <li>– Guru kurang menguasai metode pengajaran</li> <li>– Latar belakang pendidikan guru tidak sesuai dengan bidang ajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kualitas guru atau ketersediaan guru berkualitas masih rendah</li> <li>– Latar belakang pendidikan guru kurang sesuai dengan bidang ajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kualitas guru rendah</li> <li>– Kompetensi guru rendah; guru memiliki kecenderungan memperlakukan para murid secara sama rata</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: sebagian/3 informan</li> <li>• Pendukung: -</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: sebagian besar</li> <li>• Pendukung: semua</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: sebagian besar/8 informan</li> <li>• Pendukung: sebagian/4 informan</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: hampir semua/3 informan</li> <li>• Pelaksana: pengawas sekolah saja</li> <li>• Pendukung: sebagian besar guru</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: semua/5 informan</li> <li>• Pelaksana: sebagian besar/8 informan</li> <li>• Pendukung: sebagian besar/9 informan</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: -</li> <li>• Pendukung: -</li> <li>– Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>
Jumlah guru PNS kurang dan distribusinya tidak merata	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Persebaran guru belum merata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Jumlah guru PNS kurang</li> <li>– Distribusi guru PNS tidak merata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kebutuhan guru masih tinggi, terutama untuk daerah terpencil; jumlah guru PNS masih kurang</li> <li>– Guru bidang studi dan guru PNS masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sebagian besar guru di kabupaten ini adalah guru honorer dengan latar belakang pendidikan dan tingkat kemampuan mengajar yang beragam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Distribusi guru tidak merata</li> <li>– Jumlah guru PNS/tetap untuk tingkat pendidikan dasar kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Persebaran guru tidak merata</li> <li>– Jumlah GTT di Dompu melebihi kebutuhan</li> </ul>

Masalah Pembelajaran	Lombok Tengah	Lombok Utara	Sumbawa	Sumbawa Barat	Bima	Dompu
			<ul style="list-style-type: none"> <li>– Terjadi penumpukan guru di satu tempat, termasuk guru mata pelajaran</li> <li>– Perpindahan dan rotasi guru sangat minim</li> <li>– Persebaran guru PNS di daerah terpencil terkendala kurangnya jumlah kelompok belajar</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian/2 informan</li> <li>• Pelaksana:-</li> <li>• Pendukung:-</li> <li>– Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: hampir semua/3 informan</li> <li>• Pelaksana: semua guru dan kepala sekolah</li> <li>• Pendukung: semua pendukung</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: kepala UPTD</li> <li>• Pendukung: 2 informan</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> <li>• Pelaksana: -</li> <li>• Pendukung: semua</li> <li>– Tingkat keyakinan: rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: hampir semua/3 informan</li> <li>• Pelaksana: 4 informan</li> <li>• Pendukung: 3 informan</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian/2 informan</li> <li>• Pelaksana: semua</li> <li>• Pendukung: 2 informan</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>
Pelatihan bagi guru kurang memperoleh perhatian	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pelatihan bagi guru kurang</li> <li>– Sarana untuk meningkatkan kapasitas guru kurang tersedia (pelatihan bagi guru kurang dan MGMP/KKG tidak aktif)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas guru dan pengawas sekolah kurang</li> <li>– Referensi mengajar guru kurang</li> <li>– KKG dan MGMP kurang aktif, dan saat ini guru dari sekolah satu atap tidak diikutsertakan dalam forum-forum tersebut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penguatan KKG diperlukan</li> <li>– Pelatihan bagi guru kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Guru tidak siap dalam menerapkan kurikulum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pelatihan bagi guru kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Pelatihan bagi para guru terbatas</li> <li>– Forum MGMP untuk guru-guru SMP di wilayah studi telah vakum selama dua tahun</li> <li>– Kebijakan mengenai seleksi penerimaan GTT tidak ketat</li> </ul>

Masalah Pembelajaran	Lombok Tengah	Lombok Utara	Sumbawa	Sumbawa Barat	Bima	Dompu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: -</li> <li>• Pendukung: 2 informan</li> <li>- Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: semua</li> <li>• Pendukung: sebagian besar</li> <li>- Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: 1 informan</li> <li>• Pelaksana: 4 informan</li> <li>• Pendukung: 1 informan</li> <li>- Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian/2 informan</li> <li>• Pelaksana: pengawas sekolah</li> <li>• Pendukung: -</li> <li>- Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> <li>• Pelaksana: 6 informan</li> <li>• Pendukung: 4 informan</li> <li>- Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: para guru</li> <li>• Pendukung: -</li> <li>- Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>
Motivasi dan profesionalisme guru rendah; komitmen guru terhadap pengajaran dan pembelajaran murid rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minat guru untuk membaca rendah</li> <li>- Minat guru untuk belajar rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas/kualitas pengajaran guru rendah</li> <li>- Tingkat literasi guru dan kemauan belajar guru rendah; guru kurang termotivasi untuk membaca</li> <li>- Tingkat kesejahteraan guru, terutama GTT, rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru hanya mengejar kompensasi dan sertifikasi</li> <li>- Mutu dan perilaku guru tidak berubah karena mereka berada di zona nyaman</li> <li>- Perubahan paradigma guru diperlukan</li> <li>- Guru memiliki masalah terkait kedisiplinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas kepemimpinan kepala sekolah rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivasi dan profesionalisme guru untuk meningkatkan hasil pembelajaran murid rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Guru sekadar menjalankan kewajibannya, yaitu mengajar sehari-hari tanpa merasa perlu untuk mengikuti isu-isu pendidikan terbaru atau mempelajari metode pembelajaran murid terbaru</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian/2 informan</li> <li>• Pelaksana:-</li> <li>• Pendukung: 3 informan</li> <li>- Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> <li>• Pelaksana: semua guru dan kepala sekolah</li> <li>• Pendukung: -</li> <li>- Tingkat keyakinan: rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian/2 informan</li> <li>• Pelaksana: para guru dan kepala sekolah</li> <li>• Pendukung: 1 informan</li> <li>- Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan:-</li> <li>• Pelaksana: sebagian (pengawas sekolah, wakil kepala sekolah, dan para guru)</li> <li>• Pendukung:-</li> <li>- Tingkat keyakinan: rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian/2 informan</li> <li>• Pelaksana: -</li> <li>• Pendukung: sebagian/5 informan</li> <li>- Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> <li>• Pelaksana: sebagian/5 informan</li> <li>- Tingkat keyakinan: rendah</li> </ul>
Anggaran dan infrastruktur pendidikan kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana penunjang bagi pembelajaran murid kurang</li> <li>- Akses terhadap pendidikan bagi anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana dan prasarana sekolah kurang; dukungan bagi upaya peningkatan kapasitas/kualitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan dari sistem masih kurang; daerah tidak bisa mengangkat guru honorer dari APBD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sekolah tidak siap dalam menerapkan kurikulum</li> <li>- Pengelolaan pendidikan bagi anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan anggaran bagi penyelenggaraan pendidikan masih terbatas dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Secara umum anggaran dan infrastruktur memadai, tetapi terdapat</li> </ul>

Masalah Pembelajaran	Lombok Tengah	Lombok Utara	Sumbawa	Sumbawa Barat	Bima	Dompu
	<p>berkebutuhan khusus (ABK) kurang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Terdapat kesenjangan kualitas antarsekolah</li> </ul>	<p>pengajaran guru kurang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Terdapat permasalahan terkait penerapan kurikulum dan dukungan untuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah</li> <li>– Standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan belum terpenuhi</li> <li>– Terdapat kesenjangan antarsekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Anggaran BOS membantu, tetapi jumlahnya masih terbatas</li> <li>– Fasilitas penunjang di sekolah kurang</li> </ul>	<p>berkebutuhan khusus belum maksimal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Terdapat isu terkait keterpencilan/jarak sekolah yang menghambat proses pembelajaran murid</li> <li>– Terdapat permasalahan terkait ketersediaan sarana untuk belajar, khususnya buku pelajaran</li> </ul>	<p>perencanaannya kurang matang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dukungan bagi infrastruktur penunjang di tingkat pendidikan dasar kurang</li> <li>– Sarana dan prasarana sekolah minim; akses terhadap pendidikan di daerah terpencil masih terbatas</li> </ul>	<p>kesenjangan yang tinggi terkait kelengkapan sarana dan prasarana antarsekolah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Dukungan spesifik bagi murid dengan kebutuhan khusus belum ada</li> <li>– Media pembelajaran yang diterima sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah</li> </ul>
	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: semua</li> <li>• Pendukung: orang tua murid</li> </ul> <p>– Tingkat keyakinan: tinggi</p>	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: semua kepala sekolah</li> <li>• Pendukung: para orang tua murid</li> </ul> <p>– Tingkat keyakinan: tinggi</p>	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian/2 informan</li> <li>• Pelaksana: 6 informan</li> <li>• Pendukung: 1 informan</li> </ul> <p>– Tingkat keyakinan: tinggi</p>	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: semua</li> <li>• Pendukung: sebagian besar</li> </ul> <p>– Tingkat keyakinan: tinggi</p>	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: semua/5 informan</li> <li>• Pelaksana: sebagian besar</li> <li>• Pendukung: orang tua murid</li> </ul> <p>– Tingkat keyakinan: tinggi</p>	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: semua</li> <li>• Pelaksana: semua</li> <li>• Pendukung: semua</li> </ul> <p>– Tingkat keyakinan: tinggi</p>
Perhatian dan dukungan orang tua rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perhatian wali murid kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dukungan orang tua kurang; masyarakat belum melihat pentingnya pendidikan</li> <li>– Dukungan orang tua terhadap pendidikan anak kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Terdapat persoalan anak sekolah yang bekerja</li> <li>– Kepedulian orang tua terhadap pendidikan anak masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Dukungan orang tua terhadap pendidikan anak kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Perhatian/dukungan orang tua masih kurang</li> <li>– Orang tua masih mengikutsertakan anak dalam kegiatan usaha</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kepedulian orang tua dalam mendukung pendidikan anak kurang</li> <li>– Murid-murid diajak orang tua mereka untuk bekerja di ladang</li> </ul>
	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian besar</li> </ul>	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> </ul>	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: 1 informan</li> </ul>	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian/2 informan</li> </ul>	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: 1 informan</li> </ul>	<p>– Informan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> </ul>

Masalah Pembelajaran	Lombok Tengah	Lombok Utara	Sumbawa	Sumbawa Barat	Bima	Dompu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana: guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah</li> <li>• Pendukung: orang tua murid</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana: guru dan kepala sekolah</li> <li>• Pendukung: sebagian besar</li> <li>– Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana: 6 informan</li> <li>• Pendukung: 3 informan</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana: semua</li> <li>• Pendukung: sebagian besar</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana: sebagian besar/14 informan</li> <li>• Pendukung: 4 informan</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana: sebagian besar</li> <li>• Pendukung: -</li> <li>– Tingkat keyakinan: tinggi</li> </ul>
Minat murid untuk belajar rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Penguasaan bahasa Indonesia rendah karena bahasa lokal masih digunakan di sekolah dan di rumah</li> <li>– Murid kesulitan memahami pembagian dan perkalian</li> <li>– Murid putus sekolah</li> <li>– Murid terpapar bahaya teknologi (<i>game</i>, TV)</li> <li>– Pelajaran tambahan bagi murid kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Tingkat keberlanjutan pendidikan murid ke jenjang pendidikan menengah dan atas rendah</li> <li>– Terdapat keterbatasan belajar pada anak, seperti rendahnya minat untuk membaca dan belajar; tingginya minat untuk bermain; rendahnya kemahiran berbahasa Indonesia; dan tingginya ketergantungan pada kalkulator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Minat murid untuk membaca rendah</li> <li>– Murid jarang mengunjungi perpustakaan</li> <li>– Tingkat literasi murid rendah karena mereka masih menggunakan bahasa lokal bahkan di lingkungan sekolah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Terdapat pengaruh perkembangan teknologi</li> <li>– Anak-anak lebih senang menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia dengan teman-temannya di sekolah</li> <li>– Motivasi murid untuk belajar dan minat murid untuk membaca rendah</li> <li>– Murid-murid tidak termotivasi untuk belajar; mereka juga sulit sekali diberi motivasi belajar oleh guru</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Minat murid untuk membaca dan belajar rendah, sedangkan minat untuk menonton tayangan televisi tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Capaian kemahiran membaca, menulis, dan berhitung (<i>calistung</i>) rendah</li> <li>– Bahasa lokal (bahasa Mbojo) masih lazim digunakan oleh guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar</li> <li>– Murid terpapar bahaya teknologi (telepon genggam, internet)</li> <li>– Murid terpapar bahaya narkoba</li> <li>– Masih dijumpai murid kelas besar yang belum lancar dalam <i>calistung</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> <li>• Pelaksana: sebagian</li> <li>• Pendukung: orang tua murid dan ornop</li> <li>– Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: guru dan kepala sekolah</li> <li>• Pendukung: orang tua murid</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: 1 informan</li> <li>• Pelaksana: -</li> <li>• Pendukung: -</li> <li>– Tingkat keyakinan: rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> <li>• Pelaksana: semua</li> <li>• Pendukung: -</li> <li>– Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian/2 informan</li> <li>• Pelaksana: 7 informan</li> <li>• Pendukung: sebagian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> <li>• Pelaksana: semua</li> <li>• Pendukung: -</li> <li>– Tingkat keyakinan: rendah</li> </ul>

Masalah Pembelajaran	Lombok Tengah	Lombok Utara	Sumbawa	Sumbawa Barat	Bima	Dompu
		– Tingkat keyakinan: tinggi			– Tingkat keyakinan: tinggi	
Pengaruh kepentingan politik kuat	– Penempatan guru dan kepala sekolah dipengaruhi pertimbangan politis	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kebijakan terkait sektor pendidikan di daerah banyak didominasi oleh politik lokal</li> <li>– Terdapat dominasi politik dalam kebijakan di bidang pendidikan di daerah</li> <li>– Mutasi/rotasi kepala sekolah diduga banyak dipengaruhi kepentingan politik kepala daerah terpilih dan para pendukungnya; rekomendasi unit pelaksana teknis tidak dipakai</li> </ul>	–	–	– Pengaruh politik dalam kebijakan di bidang pendidikan kuat	– Penempatan GTT tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah; pemberhentian dan/atau pemindahan kepala sekolah dan guru diduga juga dipengaruhi pertimbangan politis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian/2 informan</li> <li>• Pelaksana: -</li> <li>• Pendukung: -</li> <li>– Tingkat keyakinan: rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: semua/4 informan</li> <li>• Pelaksana: sebagian kelompok guru</li> <li>• Pendukung: sebagian</li> <li>– Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>	–	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian besar/3 informan</li> <li>• Pelaksana:-</li> <li>• Pendukung: 4 informan</li> <li>– Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Informan:</li> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> <li>• Pelaksana: sebagian</li> <li>• Pendukung: -</li> <li>– Tingkat keyakinan: rendah</li> </ul>
Pembelajaran murid tidak tuntas	– KKM tidak tercapai; murid terpaksa dinaikkan/diluluskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi	–	–	–	–	– Ketuntasan belajar mengajar di setiap tahun ajaran tidak tercapai

Masalah Pembelajaran	Lombok Tengah	Lombok Utara	Sumbawa	Sumbawa Barat	Bima	Dompu
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> <li>• Pelaksana: para guru</li> <li>• Pendukung: -</li> </ul> </li> <li>- Tingkat keyakinan: rendah</li> </ul>	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian besar/3 informan</li> <li>• Pelaksana: sebagian besar</li> <li>• Pendukung: -</li> </ul> </li> <li>- Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>
Peran pengawas sekolah lemah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peran pengawas sekolah dalam melakukan pengawasan belum maksimal</li> <li>- Kualitas kepala sekolah dalam melakukan pengawasan rendah</li> <li>- Rekomendasi dari pengawas sekolah tidak dijalankan; pengawas sekolah hanya bisa mengawasi, tetapi tidak bisa mengintervensi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengawas sekolah kurang dilibatkan oleh Dinas Dikpora dalam pembuatan kebijakan</li> <li>- Pelatihan bagi pengawas sekolah kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan dan evaluasi oleh pengawas sekolah kurang</li> <li>- Pengawas sekolah kurang disiplin</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi pengawas sekolah tidak dipakai sebagai landasan pembuatan kebijakan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: sebagian/2 informan</li> <li>• Pelaksana: sebagian kecil//3 informan</li> <li>• Pendukung:-</li> </ul> </li> <li>- Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> <li>• Pelaksana: sebagian</li> <li>• Pendukung: -</li> </ul> </li> <li>- Tingkat keyakinan: rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: 1 informan</li> <li>• Pelaksana: 2 informan</li> <li>• Pendukung: 1 informan</li> </ul> </li> <li>- Tingkat keyakinan: sedang</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Informan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuat kebijakan: -</li> <li>• Pelaksana: 1 informan</li> <li>• Pendukung: -</li> </ul> </li> <li>- Tingkat keyakinan: rendah</li> </ul>

## LAMPIRAN 2

### Bentuk Kebijakan/Inovasi/Program Pembelajaran Pendidikan Dasar di Daerah Berdasarkan Pemrakarsa

Kabupaten	Pemda (termasuk bantuan donor)	Ornop	Perusahaan	Sekolah
Lombok Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Program <i>good practices</i> atau <i>lessons learned</i> (proyek Bank Dunia 2006–2010) terkait praktik pendidikan di semua satuan pendidikan di Lombok Tengah</li> <li>(2) Pendidikan inklusif di semua satuan pendidikan bagi murid berkebutuhan khusus di sekolah reguler</li> </ul>	–	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelatihan guna meningkatkan kemampuan berpidato dalam bahasa Indonesia</li> <li>(2) Sepume-Sepuma; kegiatan ini berupa sepuluh menit membersihkan sampah di kelas dan pekarangan, serta sepuluh menit membaca bacaan apapun selain buku ajar</li> <li>(3) Pembacaan Alquran selama 15 menit setiap pagi sebelum jam pelajaran dimulai; kegiatan membaca Alquran bertujuan untuk mengharap berkah agar murid-murid memperoleh kemudahan memahami pelajaran setiap hari</li> <li>(4) Pesantren kilat yang dijalankan melalui telepon genggam di sebuah SMP pada 2011/2012</li> </ul>
Lombok Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelatihan ELPSA yang diselenggarakan oleh University of Canberra dan IKIP Mataram dalam kerja sama dengan pemda; kerja sama ini merupakan inisiatif pemerintah asing/Australia dan pemda</li> <li>(2) Guru Model</li> <li>(3) Pelatihan bagi kepala sekolah oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)</li> <li>(4) Anjuran dari bupati untuk membaca Alquran selama 15 menit sebelum pelajaran dimulai; kegiatan Mentari Pagi dilakukan di SD sebelum pelajaran dimulai—salah satunya adalah kegiatan berdoa bersama dan pemberian nasihat oleh guru kepada murid</li> <li>(5) Kembali ke Khittah Pendidikan; namun, wujud kebijakan ini belum jelas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Peningkatan literasi anak dan perempuan oleh ornop Klub Baca Perempuan (KBP) sejak 2006</li> <li>(2) Taman bacaan di sebuah sekolah yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan dikelola dengan bantuan KBP</li> <li>(3) Bantuan sarana dan prasarana sekolah agar ramah bagi murid berkebutuhan khusus dari Handicap International, termasuk pembangunan fisik sekolah yang disesuaikan dengan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Bantuan dari sebuah bank nasional pada 2014 untuk pembiayaan pertemuan guru mata pelajaran, termasuk MGMP</li> <li>(2) Penggalangan dana dari perusahaan oleh Asosiasi Komite Sekolah Gili Indah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di kawasan Gili Indah (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air)</li> </ul>	

Kabupaten	Pemda (termasuk bantuan donor)	Ornop	Perusahaan	Sekolah
	<p>(6) SPM pendidikan dasar; belum lama ini pernah ada tinjauan terhadap SPM pelayanan dasar, termasuk pendidikan, yang merupakan bentuk kerja sama antara pemda kabupaten dan Uni Eropa</p> <p>(7) Program Percepatan Inovasi dan Nilai Tambah; program ini dicanangkan oleh Dinas Dikpora guna percepatan peningkatan pendidikan di Lombok Utara dan pelaksanaannya melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama</p>	kebutuhan khusus, serta alat-alat bantu seperti kursi roda dan tongkat	(3) Bantuan dari sebuah hotel untuk anak sekolah dalam skala kecil	
Sumbawa	<p>(1) BOSDA; bantuan ini diberikan sejak 2009</p> <p>(2) Pemberian insentif kepada guru daerah terpencil sejak 2010</p> <p>(3) Peningkatan kapasitas MGMP/KKG pada 2008 untuk berbagi pengalaman dan memperkaya pengetahuan guru</p> <p>(4) Insentif bagi guru madrasah dari Dinas Dikpora</p> <p>(5) Jurnal Pendidikan SAMAWA; jurnal ini terbit perdana pada Maret 2016</p> <p>(6) Jurnal Cendekia; jurnal ini terbit sejak 2015 yang merupakan modifikasi dari program Better Education through Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU) pada 2011/2012</p> <p>(7) Forum Ilmiah Guru (FIG)</p>	(1) Sekolah komunitas dan LPPH, Universitas Teknologi Sumbawa	–	(1) Komite sekolah di setiap dusun
Sumbawa Barat	<p>(1) Program pendidikan gratis tingkat TK hingga SMA/MA/SMK melalui program BOSDA</p> <p>(2) Program wajib belajar 12 tahun</p> <p>(3) Pemberlakuan jam belajar malam</p> <p>(4) University of Canberra dan IKIP Mataram bekerja sama dengan Pemda Sumbawa Barat mengadakan pelatihan ELPSA; kerja sama ini merupakan inisiatif pemerintah</p>	(1) Pendampingan dalam pengelolaan perpustakaan dan majalah dinding sekolah (pelatihan bagi pustakawan dan studi banding), serta penambahan koleksi perpustakaan sekolah pada 2007	<p>Dari sebuah perusahaan swasta setempat:</p> <p>(1) Beasiswa bagi murid berprestasi dan murid dari keluarga tidak mampu melalui sekolah pada 1998–2014; sekarang, beasiswa diberikan melalui pengajuan</p>	<p>(1) Pendampingan murid Kelas 3 yang memiliki kemampuan literasi dan numerasi rendah</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan KKG di internal sekolah</p> <p>(3) Penggunaan Quipper School</p>

Kabupaten	Pemda (termasuk bantuan donor)	Ornop	Perusahaan	Sekolah
	<p>asing/Australia dengan pemda (di sebuah SMPN sampel, ada guru yang mengikuti pelatihan ELPSA)</p> <p>(5) Pembentukan forum komite sekolah di kecamatan</p> <p>(6) Bantuan seragam gratis</p>	<p>(2) Sebuah perusahaan swasta setempat bekerja sama dengan ornop dalam menyelenggarakan pelatihan guna peningkatan mutu guru dan pendampingan bagi guru yang akan membimbing murid yang mengikuti olimpiade sains pada 2015</p> <p>(3) Pendirian rumah baca pada 2012 di salah satu desa dampingan sebagai bentuk kepedulian terhadap rendahnya minat baca murid</p> <p>(4) Pihak ornop dan sekolah mengakui bahwa program-program tersebut masih belum berdampak besar pada minat baca murid</p>	<p>permohonan langsung oleh murid kepada perusahaan ini</p> <p>(2) Program peningkatan mutu guru yang dibantu ornop</p> <p>(3) Pendampingan murid yang akan mengikuti olimpiade sains dan berbagai perlombaan bagi murid antarsekolah seperti lomba bercerita (<i>story telling</i>), karya ilmiah remaja (KIR), karikatur, dan lomba-lomba lain yang pelaksanaannya dibantu ornop pada 2009–2013</p> <p>(4) Pembebasan lahan dan pembangunan sekolah oleh perusahaan ini, khususnya di wilayah sekitar tambang; hingga 2015 perusahaan ini memberikan bantuan untuk pembangunan fisik kepada 79 sekolah mulai dari tingkat TK hingga SMA di NTB, 56 sekolah di antaranya mendapat bantuan berupa pembangunan gedung baru, perbaikan gedung lama, dan</p>	

Kabupaten	Pemda (termasuk bantuan donor)	Ornop	Perusahaan penyediaan fasilitas sekolah	Sekolah
Bima	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kabupaten Layak Anak; program ini mereplikasi program dari pusat dan dilaksanakan melalui pembangunan perpustakaan</li> <li>(2) Tenaga Kontrak Khusus; sebanyak 30 orang guru SD ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia (3T)</li> <li>(3) Bima Mengajar; program ini mereplikasi program Indonesia Mengajar</li> <li>(4) Wahana Edukasi Bima; program ini merupakan wadah untuk kegiatan pendidikan bagi murid di daerah terpencil</li> <li>(5) Ruang Berbagi Ilmu; program ini menjembatani relawan di bidang pendidikan dari ibu kota yang ingin berbagi</li> <li>(6) Perda Pendidikan No. 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>(7) Perbup No. 39 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan; perbup ini mengatur dan menguatkan standar pelayanan minimal pendidikan nasional agar lebih efektif</li> <li>(8) ProDEP; program ini merupakan program pengembangan keprofesian tenaga kependidikan sebagai bagian dari Program Kemitraan Australia dan Indonesia untuk memperbaiki mutu kepemimpinan dan pengelolaan sekolah dan madrasah</li> <li>(9) Membumikan Alquran melalui kegiatan mengaji Alquran pada 15 menit sebelum pelajaran pertama dimulai</li> <li>(10) Kelas Inspirasi</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemberian jam tambahan untuk pelajaran calistung bagi anak kelas 1–3</li> <li>(2) Rapat guru yang dilaksanakan setiap Sabtu untuk berbagi pengalaman dan pemberian motivasi dari kepala sekolah kepada guru</li> </ul>

Kabupaten	Pemda (termasuk bantuan donor)	Ornop	Perusahaan	Sekolah
Dompu	(1) Pakta integritas antara Dinas Dikpora dan kepala sekolah SD tentang ketuntasan calistung pada 2008–2010	(1) Ornop Plan Indonesia-Unit Dompu memberikan pelatihan bagi para guru tentang cara mengajar yang menyenangkan bagi murid; program ini menysasar guru-guru di sekolah yang terpilih dan berakhir sekitar 2011/2012 dan tidak dilakukan di dua kecamatan sampel studi INOVASI	-	(1) Kegiatan berceramah oleh murid secara bergantian di SMPN 7 Islam Terpadu Dompu sejak 2015 (2) Pendampingan bagi murid yang lemah dalam pelajaran, termasuk calistung (informasi ini diperoleh dari ketua MKKS) (3) Dekorasi kelas sebagai media pembelajaran yang diselenggarakan atas inisiatif kepala SDN 15 Woja pada 2016/2017 (4) Ulangan dengan sistem buku terbuka ( <i>open book</i> ); ulangan dengan sistem ini pernah dilakukan di SMPN 4 Manggalewa (5) <i>Home visit</i> ; kegiatan ini adalah kegiatan menjemput dan mengantar murid dari rumah ke sekolah yang dijalankan oleh kepala sekolah SD dan SMP dan para guru dengan dukungan dana BOS (informasi ini diperoleh dari ketua MKKS)

## **The SMERU Research Institute**

Telepon : +62 21 3193 6336

Faksimili : +62 21 3193 0850

Surel : [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id)

Situs web : [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)

Facebook : [@SMERUInstitute](https://www.facebook.com/SMERUInstitute)

Twitter : [@SMERUInstitute](https://twitter.com/SMERUInstitute)

YouTube : [The SMERU Research Institute](https://www.youtube.com/channel/UC...)